



**PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM
PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH OLEH
BANK SYARIAH MANDIRI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH
NIM : B4A 003 002

PEMBIMBING

Prof. ABDULLAH KELIB, SH
NIP. 130 354857

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4334/7/MIH/C.
Tgl.	24-7-06

**PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM
PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH OLEH
BANK SYARIAH MANDIRI**



Disusun oleh

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH
NIM : B4A 003 002

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP. 130 354857

**Mengetahui,
Ketua Program**

Magister Ilmu Hukum



Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350519

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..." (Al-Baqarah : 185)

"... Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur" (Al-Ma'idah : 6)

*Serendah-rendahnya Ilmu Pengetahuan
adalah yang terhenti pada lidah
dan setinggi-tingginya Ilmu Pengetahuan
adalah yang tampak pada seluruh amal perbuatan
(Aldhytia Kurniyansa Sudewa)*

Persembahan

Kupersembahkan kepada :

- * Istriku tercinta Kandu Murdaningsih*
- * Anakku Raissa Aqila Sudewa*
- * Kedua orang tuaku
Bapak Saib Mahmud & Ibu Suyanti*
- * Almamaterku*

ABSTRAK

Sistem Hukum Perbankan atas dasar syariah prinsip (Hukum Islam) dimana prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 diharapkan akan dapat memberikan kontribusi, menciptakan kehati-hatian, dan keharmonisan bagi bank dan nasabah serta dapat berfungsi lebih efektif dan efisien.

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Apakah prinsip-prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah Bank Syariah Mandiri Semarang, Bagaimana penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah oleh Bank Syariah Mandiri Semarang, dan Apakah hambatan yuridis dan penyelesaian yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Semarang dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Metoda Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Penelitian yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri menemukan bahwa prinsip-prinsip penerapan bagi hasil terdiri dari prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah. Penerapan pembiayaan berdasarkan bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Hambatan yuridis dan penyelesaian dalam menerapkan prinsip bagi hasil adalah belum adanya perangkat hukum, masalah sumber daya manusia insani, standar fatwa.

Kata kunci: Prinsip Mudharabah, Prinsip Musyarakah.

ABSTRACT

Banking law system on the basis of syariah principles (Islamic Law) with profit sharing system, enables to apply in Indonesia after the prevailing of the Act number 7, 1992 about Banking (article 6 letter m). This act was followed by the implementation stipulation in The Government Regulation number 72, 1992. It is hoped that this act can give contribution, creating carefulness, and harmony for banks and customers and can perform effectively and efficiently.

The problems discussed in this thesis; 1) What are the principles of profit sharing in financing the customers by Bank Syariah Mandiri Semarang, 2) How is the application of financing on the basis of profit sharing principles on the customers of Bank Syariah Mandiri Semarang, and 3) What are the juridical obstructions and the settlements faced by Bank Syariah Mandiri Semarang in applying profit sharing principles in financing customers.

The approach method conducted in this research was Juridical Normative by the research on positive law collection, the research on legal principles, law systematic, vertical and horizontal synchronizations degree, the history of law, and legal comparison.

The research conducted in Bank Syariah Mandiri found that the profit sharing principles are consist of mudharobah and musyarokah principles. The financing applications were based on profit sharing consist of mudharobah and musyarokah financing. The juridical obstructions and the settlements in applying profit sharing principles were there was no legal equipment, the problems of human resources, and fatwa standard.

Keywords : Mudharobah Principles, Musyarokah Principles.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanaahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul : PRINSIP-PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH OLEH BANK SYARIAH MANDIRI.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu pesyaratan guna menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Kajian Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah sudi memberikan saran, nasihat dan kritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama, kepada ;

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Prof. Ir.H. Eko Budihardjo MSc.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Prof. Dr.dr. Soeharyo Hadisaputro.
3. Prof. H. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengesahkan penulisan tesis ini.
4. Sekretaris Akademik, Ibu Ani Purwanti, SH,MHum dan Bapak Ibu staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
5. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan perkuliahan secara profesional dan arif telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Prof. H. Abdullah Kelib SH. selaku pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, serta bimbingan sehingga selesainya tesis ini.
7. Pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri Semarang beserta staf yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak Priyono dan Baharudin, SH.

8. Rekan-rekan Angkatan 2003, yang menjadi mitra diskusi dalam mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum khususnya Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi UNDIP.
9. Istri dan Anakku tercinta, KANDU MURDANINGSIH, SH dan RAISSA AQILA SUDEWA yang dengan setia dan tulus mendorong serta memberikan semangat, untuk segera menyelesaikan studi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak SAIB MAHMUD dan Ibu SUYANTI, ucapan terima kasih dari lubuk hati paling dalam ananda sampaikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

Aldhytia Kurniyansa Sudewa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
RAGAAAN	xiv
BAB I · PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Lokasi Penelitian	11

4. Sumber dan Jenis Data	11
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Metode Analisa Data	14
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan terhadap Perbankan Konvensional	26
1. Ruang Lingkup Perbankan	26
1.1. Pengertian Bank	26
1.2. Aspek Hukum Perbankan	28
1.3. Kegiatan Usaha Perbankan	29
1.4. Bentuk Hukum Bank	31
2. Jenis-jenis Bank	32
2.1. Dilihat dari Bidang Usahanya	33
2.2. Dilihat dari Kepemilikannya	34
2.3. Dilihat dari Fungsi dan Tujuan Usahanya	35
2.4. Dilihat dari Operasionalnya	36
3. Sistem Bunga dalam Bank Konvensional	37
3.1. Pengertian Bunga	38

3.2. Hukum Bunga Bank	39
3.3. Alasan Pembayar Pengambilan Bunga	42
B. Tinjauan Terhadap Bank Syariah	43
1. Ruang Lingkup Bank Syariah	43
1.1 Pengertian Bank Syariah	43
1.2 Pengaturan Hukum Positif Bank Umum Syariah	44
1.3 Landasan Syariah	46
1.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah	47
2. Sistem Pembiayaan Bank Syariah	51
2.1 Hubungan Hukum Antara Bank (Shahibul Maal) dengan Nasabah berdasar perjanjian Al-Mudharabah ..	54
2.2 Hubungan hukum antara bank dengan berdasar perjanjian Al-Musyarakah	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri	61
2. Kegiatan Bank Syariah Mandiri	61
A. Prinsip-prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah Mandiri	73
1. Prinsip Al-Mudharabah	73
1.1 Pengertian Al-Mudharabah	74

1.2	Landasan Syariah	76
1.3	Jenis-jenis Al-Mudharabah	77
1.4	Manfaat dan Risiko Al-Mudharabah	79
2.	Prinsip Al-Musyarakah	80
2.1	Pengertian Al-Musyarakah	81
2.2	Landasan Syariah	82
2.3	Jenis-jenis Al-Musyarakah	82
2.4	Manfaat dan Risiko Al-Musyarakah	84
3.	Prinsip-prinsip dalam Kegiatan Operasional Bank Syariah ..	85
 B. Penerapan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil		
	Terhadap Nasabah Bank Syariah Mandiri	89
1.	Pembiayaan Al-Mudharabah	89
1.1	Syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil	91
1.2	Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah	103
1.3	Berakhirnya perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah ..	105
2.	Pembiayaan Al-Musyarakah	107
2.1	Syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil	109
2.2	Manfaat dan Risiko pembiayaan secara Musyarakah ..	112

C. Hambatan Yuridis yang dihadapi oleh Bank Syariah

Mandiri Semarang dalam menerapkan prinsip bagi hasil

dalam pembiayaan terhadap nasabah114

1. Hambatan Yuridis penerapan prinsip bagi hasil114

**2. Usaha penyelesaian hambatan penerapan prinsip bagi hasil
dalam pembiayaan terhadap nasabah117**

BAB IV PENUTUP120

1. KESIMPULAN120

2. SARAN122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Ragaan 1. Skema Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah	56
2. Ragaan 2. Skema Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah	58
3. Ragaan 3. Konsep dan Sistem Perbankan Syariah	71
4. Ragaan 4. Konsep Produk Perbankan Syariah	72
5. Ragaan 5. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa *financial* perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis di mana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Saat ini perbankan nasional Indonesia mengalami suatu “depresi” yang sangat berat untuk dipulihkan kembali sebagai sebuah lembaga yang sehat di dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Pemulihan sistem perbankan terkait satu dengan lainnya sangat penting untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena bank berfungsi tidak hanya sebagai perantara pihak-pihak *surplus of funds* (kelebihan dana) dan pihak *lack of funds* (memerlukan dana), namun juga berfungsi sebagai *agent of development*¹ yaitu sebagai alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yaitu berfungsi

¹ Muhammad Djumhara, Hukum Perbankan Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000), hal.86

sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Arah Kebijakan Ekonomi Makro dalam GBHN 1999-2004, bahwa :

Perekonomian nasional dituntut mampu memantapkan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah terulangnya krisis dan mengamankan proses pemulihan ekonomi di mana langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain memulihkan fungsi intermediasi perbankan.

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pengaturan perbankan terus disempurnakan, dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syariah. Disamping itu di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam.

Konsep perbankan syariah apabila dipandang dari ekonomi makro, maka dapat dikemukakan bahwa dalam ekonomi Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Firman Allah SWT:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar”. (Al-Hadiid:7)

Keberadaan Bank Syariah Mandiri dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum terbesar yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) Islam, sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan jasa perbankan masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 maka memberikan landasan hukum bagi Bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank – bank syariah.

Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut, perbankan nasional Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau *dual banking system*, yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara. Penerapan *dual banking system* harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem, sehingga Bank

Indonesia sebagai bank sentral dalam menetapkan kebijakan harus tetap dalam kerangka kedua Undang-undang tersebut dan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan bank konvensional.

Perbedaan keduanya adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan sistem bunga yang diyakini umat Islam sebagai diharamkan memiliki sifat *inflatoir* dan cenderung diskriminatif². Sehubungan dengan bunga bank Anwar Nasution mengemukakan beberapa pengaruh dengan adanya bunga bank adalah sebagai berikut :³

Bahwa tingkat suku bunga yang mahal dewasa ini telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha, neraca pembayaran luar negeri maupun bagi pengendalian moneter dan kurs devisa, bahkan menurutnya tingkat bunga yang semakin mahal sejak tahun 1990 telah meningkatkan biaya operasi, sehingga menimbulkan high cost bagi ekonomi Indonesia.

Sedangkan bank umum yang mendasarkan pada prinsip syariah lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik untuk memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.

Bank Syariah telah terbukti sangat *resisten* (tahan) terhadap krisis moneter sebagaimana diungkapkan Soebardjo Joyo Sumanoro yang menyatakan bahwa:⁴

² Muhaimin, Eksistensi Bank Syariah dan Pengembangannya Di Indonesia, Tesis Undip, 2001, hal.8

³ Neni Sri Imaniyati, Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia, Tesis Undip, 1997, hal. 4

⁴ Soebardjo Joyosumantoro, Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Pengembangan Bank Sentral Asia Tenggara SEACEN yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia) dalam Majalah SAKSI No.20, Tahun II tanggal 31-13 Juni tahun 2000, hal. 9-21.

Upaya restrukturisasi perbankan yang berlangsung sejak Juli tahun 1998 hingga Desember 2001 ini, adalah upaya mengatasi dampak krisis dan peningkatan ketahanan sistem perbankan masa depan.... Indonesia memiliki 40% saja perbankan yang beroperasi secara Syariah tidak akan terkena krisis, apalagi semuanya beroperasi sesuai dengan Syariah Islam.

Bank Syariah memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang, tujuan pengembangan sistem perbankan Syariah adalah terutama untuk memenuhi :⁵

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan Syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur. yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

⁵ Cecep K.Halim, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Seminar Nasional Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram, 21 September 2000, hal. 3

Bank umum yang mendasarkan prinsip syariah merupakan suatu aturan perjanjian berdasar hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain :

1. Pembiayaan berdasar penyertaan modal (musyarakah);
2. Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (mudharabah);
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah);
4. Pembiayaan barang modal berdasar prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah);
5. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Syariah Mandiri mempunyai legalitas institusional dengan diberlakukannya PP No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Mandiri mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti

lebih lanjut dengan mengangkat judul “Prinsip-prinsip Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah oleh Bank Syariah Mandiri.

B. Perumusan Masalah

Berlakunya hukum diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan perubahan yang terjadi didalam masyarakat dimana fungsi hukum sebagai *a tool of social control*, sekaligus sebagai *a tool of social engineering* maupun fungsinya sebagai pengintegrasi terhadap kepentingan yang berbeda menjadi prinsip yang mendasar apabila masyarakat menghendaki adanya perubahan di dalam suatu sistem hukum, maka fungsi hukum haruslah menempatkan kepada kepentingan masyarakat untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum.

Dengan berlakunya sistem hukum perbankan yang mendasarkan pada prinsip Syariah (hukum Islam) dimana prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 diharapkan akan dapat memberikan kontribusi, menciptakan kehati-hatian dan keharmonisan bagi bank dan nasabah serta dapat berfungsi lebih efektif dan efisien.

Sistem perbankan yang mendasarkan pada Syariah (hukum) Islam dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah baik

melalui penghimpunan dana maupun penyaluran dana, dikaji dari aspek hukum privat merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang didahului adanya suatu kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maall* dengan investor pengelola dana atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah prinsip-prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Syariah Mandiri Semarang?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah oleh Bank Syariah Mandiri Semarang ?
3. Apakah hambatan Yuridis dan penyelesaian yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Semarang dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengkaji prinsip - prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Syariah Mandiri Semarang.

2. Untuk memahami dan mengkaji penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terhadap nasabah oleh Bank Syariah Mandiri Semarang.
3. Untuk memahami dan menjelaskan hambatan Yuridis dan penyelesaian yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Semarang dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perbankan berdasarkan Syariah.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi *policy maker* dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Perbankan, khususnya Bank yang mendasarkan pada prinsip Syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, "Suatu upaya pencaharian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang

mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.⁶

Menurut Abdullah Kelib,⁷ Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf Sinkronisasi vertikal dan horisontal⁸, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang diskriptif analitis. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan- bahan mengenai sistem perbankan yang mendasarkan pada syariah

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 28

⁷ Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekunder*, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH Undip, No. 5 - 1995, hal. 3 dari pendapat Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993. hal. 12

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, (Jakarta, 1985) hal. 14-15

dengan prinsip bagi hasil. Dengan gambaran diskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan prinsip penerapan bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah pada Bank Syariah Mandiri.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Dipilihnya Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah dikarenakan Bank ini yang masih relatif baru eksistensinya, apalagi masyarakat Semarang dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, beragam budaya, suku, agama maupun kepercayaan, sehingga sudah barang tentu memiliki problematika yang perlu dikaji secara ilmiah baik dari aspek hukum maupun ekonomi yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah Bank yang mendasarkan pada syariah dengan prinsip bagi hasil.

4. Sumber dan Jenis Data

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan antara lain terdiri dari:

a. Sumber hukum primer, yaitu

1. Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan - ketetapan MPR:

Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN

3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan

- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bagi Hasil
- Surat Edaran BI No.25/4/BPPP tanggal 29 Pebruari 1993 tentang Penjabaran dari PP No. 72/1992
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/ Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank umum berdasar prinsip Syariah (Pasal 28)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu :

- Dokumen - dokumen sistem perbankan konvensional maupun syariah dengan prinsip bagi hasil;
- Buku-buku literatur mengenai hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan perbankan konvensional dan syariah;
- Hasil Penelitian Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;
- Berbagai Jurnal, makalah maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara data kepustakaan, dilakukan dengan studi kepustakaan/literatur. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam focus permasalahan yang akan diteliti.

6. Metode Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

- a) Tahap pertama, mendasarkan dalam pendekatan, analisis digunakan dengan analisis normatif. Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan perbankan dan bank syariah pada khususnya. Dalam hal ini akan dikumpulkan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif.
- b) Tahap kedua, yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Pertama-tama dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan display data dan reduksi data.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan berganda yaitu adanya sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga dan perbankan yang mendasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil.

Terbentuknya bank yang berdasar pada prinsip syariah merupakan suatu perubahan yang mendasar pada masyarakat yang menghendaki perubahan suatu sistem hukum di mana fungsi hukum sebagai pengintegrasi terhadap kepentingan yang berbeda dapat menjamin stabilitas dan kepastian hukum.

Kegiatan usaha Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan bagian dalam sistem perbankan nasional Indonesia setelah mendapatkan legalitas institusional dengan diundangkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 (Pasal huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank Bagi hasil, kemudian diberlakukannya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 72 tahun 1992 dan UU No.23 tahun

1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan landasan operasional berlakunya Bank Syariah.

Bank Syariah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan aturan atau kaidah dalam Hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' para sahabat, dan qiyas ulama.

a. Sebagaimana firman Allah:

"Hai orang - orang yng beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik - baik ..." (Al-Baqarah ayat 267)

b Al-hadits

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama seperti mujahid di jalan Allah (HR. Ahmad)

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :¹⁰

1. Aqidah :

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah dan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

¹⁰ Achmad Baraba, Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Majalah Buletin Ekonomi, Bank Indonesia Jakarta), hal.2

2. Syariah :

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kelidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumininnas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya. Muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

3. Akhlaq :

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadits nabi menyatakan Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*.

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :¹¹

- 1) Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan dengan ketentuanNya.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. (Al-Hadiid:7)

“.... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan Nya kepada kalian” (An-Nuur:33).

2. Harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:
 - a) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT;
 - b) Harta sebagai perhiasan hidup;

¹¹ Didin Hafidhuddin, Pelatihan Perbankan Syariah, Tazkia Institute, dalam M.Syafii Antonio. Bank Syariah Dan Teori ke Praktek, Gema Insani : Jakarta, 2001), hal. 8-9.

- c) Harta sebagai ujian keimanan;
 - d) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahNya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan, zakat, infaq dan sedekah.
3. Pemilikan harta antara lain melalui usaha (a'mal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal sesuai dengan aturan Nya.
 4. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan *dzikrullah* tidak ingat kepada Allah SWT), melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja.
 5. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, penggabsaban, curang dalam takaran dan timbangan melalui cara-cara yang batil dan merugikan, melalui suap menyuap.

Di dalam pandangan Islam, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko, karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, umat Islam dilarang mengambil apapun jenis riba. Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.¹² Secara umum riba adalah penambahan, pada hutang baik kualitas maupun kwantitas, baik banyak ataupun sedikit adalah riba yang diharamkan.

Landasannya dalam Al-Qur'an Surah An- Nisa (4)/29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil".

¹² Tazkia Institute, Riba dan Permasalahanya, (Jakarta, 1999), hal.1

Jalan yang bathil dalam hal ini adalah pengambilan tambahan modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syari.¹³

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba tidak hanya bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an, tetapi juga dari berbagai Hadist merupakan sumber rujukan, selain Al-Qur'an, bagi umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih lanjut peraturan yang telah digariskan Al-Qur'an).

Firman Allah SWT

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Qs. Arrum:39)

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (Qs.An Nisa: 160-161).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Qs.Ali Imran :130).

“Hai orang-orang yang beriman, bertawalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan

¹³ Ibid, hal.2

sisanya riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (Qs. Al-Baqoroh : 278-279).

Larangan riba dalam Hadist sebagaimana isi surat Rasulullah SAW kepada Itab bin Usaid, Gubernur Mekkah, agar kaum Tahif tidak menuntut hutangnya (riba yang telah terjadi sebelum kedatangan Islam) dari Bani Mughirah.

"Ingatlah kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."

Hadits ini merupakan amanat terakhir Rasulullah saw pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah.

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya pada ayah mengapa beliau melakukannya? Ayahku menjawab Rasulullah saw melarang untuk menerima harga anjing dan darah, dan Beliau juga melarang pekerjaan membekam, menerima dan memberi riba serta Beliau mencela para pembuat gambar (HR.Bukhari).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dariNya Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya".

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud bank berdasar prinsip bagi hasil adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 huruf (1) PP No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasar prinsip bagi hasil.

Pengertian prinsip bagi hasil sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PP No.72 tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasar Syariat yang digunakan oleh bank berdasar prinsip bagi hasil dalam :

1. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
2. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
3. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Di dalam Pasal 1 ayat 13, Pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil adalah :

Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No.72 tahun 1992).

Dalam penelitian ini yang dimaksud, pembiayaan terhadap nasabah dalam Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (angka 12) UU No.10 tahun 1998 adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank syariah tidak mengenal kredit atau pinjaman, melainkan pembiayaan. Kegiatan bank Syariah dalam hal modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah, mana pihak bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharah*).

Pembiayaan dalam Bank Syariah, menurut sifat penggunaannya dapat terbagi atas pembiayaan produktif, dan konsumtif. Sedang menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal, kerja dan pembiayaan investasi.¹⁴

Bank Syariah yang menetapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan nasabah. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Baraba¹⁵ antara lain menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*)

¹⁴ Op.cit, Muhammad Syafii Antonio, hal. 160

¹⁵ Achmad Baraba, dalam Nasser Atorf, Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah Produk-Produk dan Tantangannya, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (Bank Indonesia), Vol.2 No.3 Desember 1999, hal 4

dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun, sehingga dalam operasinya di kenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* (perjanjian antara pihak pertama atau pemilik dana dan pihak kedua atau pengelola) dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi risiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Di samping itu juga dikenal produk dengan prinsip *musyarakah* yaitu perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

Berbeda dengan bank konvensional (bank umum yang selama ini kita kenal), imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentase tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha bank konvensional.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum merupakan keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga (*institutions*) dan proses - proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁶

¹⁶ Lili Rasyidi.IB Wyasa, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung, 1993), hal. 16

Ronny Hanintjo Soemitro mengemukakan bahwa dalam mempelajari hukum, hendaknya dipahami sekurang-kurangnya tiga konsep mengenai hukum, yaitu :¹⁷

- 1) Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan;
- 2) Hukum sebagai suatu norma kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat;
- 3) Hukum sebagai suatu institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat yang berbentuk pola – pola tingkah laku yang melembaga.

Hukum perbankan syariah merupakan alternatif dimana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi sesuai ketentuan Nya. Sehingga dipandang perlunya mengembangkan instrumen sebagai pelengkap maupun produk-produk yang ditawarkan di dalam bekerjanya sistem hukum perbankan syariah.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu ketentuan dalam suatu pembiayaan yang telah disepakati bersama antara bank (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang berdasar syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut sebagai reduksi atas modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri (*mudharabah*)¹⁸. Berbeda dengan musyarakah, keuntungan dan kerugian akan dibagi diantara kedua pihak sesuai dengan proporsi pada modal yang diinvestasikan.

¹⁷ Ronny Hanitjo Sormitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum* (Semarang, 1999), hal.1

¹⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *terjemah Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Dana Bhakti Prima Yasa : Yogyakarta, 1996), hal.15

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari empat bab, yang tersusun secara berurutan, dari Bah I sampai Bab IV.

Bab I dalam tulisan ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, manfaat dan kontribusi dari hasil penelitian yang diperoleh, metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, serta kerangka pemikiran.

Bab II dalam tulisan ini berisi tiga sub bab yang terdiri dari sub pertama uraian mengenai tinjauan terhadap bank konvensional, ruang lingkup perbankan, dasar hukum perbankan, jenis-jenis perbankan, sistem bunga dalam bank konvensional; sub bab kedua berisi tinjauan terhadap bank syariah yang membahas ruang lingkup bank syariah, ketentuan yang mengatur, kegiatan usaha bank syariah, pengertian dan landasan syariah, prinsip bagi hasil, sistem pembiayaan bank syariah; sub bab ketiga membahas prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah di mana akan membahas hubungan hukum antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) pengelola dana baik berdasar prinsip bagi hasil secara *al-mudharabah* maupun *al-musyarakah*.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis dalam tulisan ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut profil Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, Prinsip-prinsip bagi hasil dalam

pembiayaan terhadap nasabah, Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah, hambatan Yuridis dan penyelesaian yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Semarang dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Bab IV dalam tulisan ini berisi uraian mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berdasar dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TERHADAP PERBANKAN KONVENSIONAL

1. Ruang Lingkup Perbankan

1.1. Pengertian Bank

Pengertian bank sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank yang dimaksudkan sebagai suatu jenis *pranata finansial* yang melaksanakan jasa – jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda – benda berharga, membiayai usaha – usaha perusahaan.¹⁹

¹⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute dengan Bank Indonesia, (Jakarta, 1999), hal 95 - 96

Noah Webster ²⁰ menyatakan bahwa dalam suatu kamus, kata "bank" diartikan sebagai berikut:

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998, dijelaskan pengertian perbankan adalah sebagai berikut :

"Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Menurut Abdurrahman Perbankan ²¹ (*banking*) ialah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, serta efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Sedangkan Sentosa Sembiring menyatakan ²² bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan.

²⁰ Noah Webster, dalam Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, (Bandung, 1999) hal. 13

²¹ Abdurrahman, dalam sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Mandar Maju, Bandung, 2000) hal 1

²² Abdurrahman, A dalam Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal 13

Bank sebagai Badan Hukum secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Menurut O.P Simorangkir²³ pengertian Bank diartikan sebagai :

“ Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa . Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana – dana yang dipercaya oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat – alat pembayaran baru berupa uang giral ”.

1.2. Aspek Hukum Perbankan

Munir Fuady²⁴ mengatakan bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*banking law*), yakni merupakan :

"seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, *doktrin*, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut".

²³ O.P Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum perbankan*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), hal 1

²⁴ Munir Fuady, Op, Cit hal 5

Muhammad Djumhana²⁵ menyatakan bahwa ruang lingkup hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia.

Dengan kata lain bahwa **Hukum perbankan**, adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi efisiensi, dan eksistensinya, serta hubungan dengan bidang kehidupan yang lain.

1.3. Kegiatan Usaha Perbankan

Menurut Djumhana²⁶, bahwa kegiatan usaha bank secara umum adalah sebagai berikut :

Kegiatan usaha bank di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana kegiatan usaha perbankan harus sesuai dengan jenis banknya.

Kegiatan pokok dari suatu bank umum dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang bunyinya adalah sebagai berikut :

1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

²⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1

²⁶ Ibid, hal 5

4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - b) Surat pengakuan hutang atau kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - c) Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 - e) obligasi,
 - f) Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun,
 - g) Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel atas tunjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari, tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, uang kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasar Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesemua kegiatan bank sebagaimana disebutkan di atas, pada prinsipnya merupakan kegiatan usaha suatu bank (Bank Umum maupun BPR) yang terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

- a. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
- c. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan fee based income.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan Prinsip Syari'ah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

1.4. Bentuk hukum bank

Bentuk hukum diperlukan dalam mendirikan suatu jenis usaha.

Dengan adanya suatu bentuk hukum tertentu, maka akan

mempermudah bagi para pendiri untuk merumuskan maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha yang dilakukan secara jelas, sehingga Pengaturan bentuk hukum bank diatur dalam Pasal 21 UU No.7 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

1. Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa :

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT);

2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat, dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Bentuk hukum dari kantor Perwakilan, dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

2. Jenis-jenis Bank

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 jenis bank dibagi, menjadi 2 jenis yaitu;²⁷

1. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁷ Baca, Pasal 5 ayat 1 Undang – undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Lembaga Perbankan di Indonesia, dapat dibagi dan digolongkan menjadi sebagai berikut :²⁸

2.1. Dilihat dari Bidang Usahanya

Bank ditinjau dari jenisnya ada 2 macam yaitu :

a. Bank Umum

Bank Umum mempunyai 2 bentuk yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari'ah.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (3)).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR mempunyai 2 bentuk yaitu BPR dan BPR Syari'ah.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip

²⁸ Sentosa Sembiring, Op. Cit, hal 3-7

Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (4)).

2.2. Dilihat dari Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan yakni :²⁹

1. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. Seperti BNI, BRI, BPD dan lain-lain.
2. Bank milik Swasta :
 1. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia;
 2. Swasta Asing, artinya modal tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) Badan hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan;
 3. Disamping kedua jenis bank ini, dalam dunia Perbankan dikenal pula apa yang disebut dengan Bank Campuran.
 Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di

²⁹ Sentosa Sembiring, Ibid, hal 7

Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

3. Bank Milik Pemerintah Daerah, adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2.3. Dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya

Dilihat dari segi dan fungsi dan tujuan usahanya dikenal empat bentuk jenis bank, yaitu :³⁰

1. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada;
2. Bank Umum (*Commercial Bank*) yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread).

³⁰ Muhamad Djumhana, Op, Cit, hal 83 - 84

3. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank baik negara, swasta, koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
1. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik negara, swasta maupun koperasi baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan dengan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

2.4. Dilihat dari operasionalnya

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi dalam 2 golongan, yakni :³¹

1. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
2. Bank Non Devisa, artinya bank tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi valuta asing.

³¹ Sentosa Sembiring, Op, Cit, hal 7

3. Sistem Bunga dalam bank konvensional.

3.1. Pengertian bunga

Pengertian bunga sebagaimana dinyatakan oleh Eri Sudewo³² bahwa bunga adalah pertumbuhan atau penambahan nilai. Bunga merupakan perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang, secara berlebihan. Laba berbeda dengan bunga. Perbedaan laba dengan bunga menurut Eri Sudewo adalah sebagai berikut :³³

- a. Bunga mengkondisikan pemilik tak memiliki risiko. Setelah akad pinjaman disepakati, pemilik uang tak memiliki kepentingan lagi dengan peminjam. Mustahil pemilik uang rugi karena bunga telah ditentukan.
 Karena seluruh risiko ditanggung peminjam, maka si kaya bakal menjadi kaya, si miskin akan lebih miskin.
- b. Dalam setiap perdagangan, risiko merupakan hal normal. Laba merupakan hasil usaha, inisiatif dan efisiensi. Berbeda dengan bunga yang tak kenal risiko, juga tak pernah peduli pada dinamika usaha yang dijalankan peminjam.
- c. Dalam perdagangan, saat barang bertukar dengan uang, transaksi otomatis selesai, sedang dalam bunga saat pinjaman diberikan itu merupakan awal masalah. Pemilik uang tidak pernah berhenti menagih bunga dan peminjam menanggung risiko.
- d. Perdagangan adalah proses produksi karena ada kondisi penciptaan lapangan kerja. Dengan bekerja, manfaatnya bukan hanya imbalan yang diterima pekerja, sebaliknya bunga mengenalkan pada kondisi krisis, bunga telah menjadi beban karena telah menjadi biaya produksi .

³² Eri Sudewo, *Ekonomi Bebas Bunga*, Dalam kata pengantar Buku PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil, (Bandung 1999), hal 20

³³ Ibid, hal 24

- e. Bunga menjadi pemicu inflasi, untuk membayar utang, peminjam harus menaikkan harga barang dan kadang memangkas upah buruh.

Sebagai misal bunga deposito dalam sistem bank konvensional akan berbeda pada bank syariah yang berdasar prinsip bagi hasil. Pada bank konvensional, besar kecilnya bunga diperoleh deposan tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku; nominal deposito; jangka waktu deposito. Sedang pada bank syariah, besar kecilnya bagi. hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank; nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank; nominal deposito nasabah; rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank; dan jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Dalam pandangan bank konvensional, imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentase tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tertentu tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha bank konvensional.

Bunga bank dalam bahasa Fiqh diidentikkan dengan riba, sedang menurut bahasa (etimologis) bermakna *ziyadah* (tambahan).³⁴

³⁴ Setiawan Budi Utomo, "Jawaban Tuntas Masalah Bunga" Kolom Fiqh Kontemporer Majalah Saksi Bunga, No. 10 Tahun

3.2. Hukum Bunga Bank

Didalam Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998 bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian pasal tersebut di atas, bahwa dasar hukum adanya bunga karena suatu jasa imbalan dari pihak peminjam atas kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain bunga merupakan kewajiban bagi peminjam setelah menerima modal atau dana yang telah diberikan pihak kreditur.

Hukum bunga bank konvensional, menurut pandangan ajaran Islam, sebagaimana ditetapkan dalam sidang di Bandar Lampung tahun 1982 yang dikenal dengan Keputusan Lajnah Bahsul Masai'il, antara lain : ³⁵

Terdapat tiga pendapat ulama yaitu :

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente;
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat;
3. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat.

³⁵ M.Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip Setiawan Budi utomo, ibid, hal.90-91

Pendapat - pendapat tersebut adalah :

- a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram;
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh; Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram, bunga produktif tidak sama dengan riba hukumnya halal;

Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh;

Bunga bank itu tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

- c. Ada pendapat yang menyatakan hukumnya subhat (tidak identik dengan haram).

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat konsensus diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam.³⁶ Istilah riba disebutkan dalam (empat) Surat dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275-280, Surat Ali Imron ayat 130, Surat An-Nisa ayat 29, 161, dan surat Ar-Ruum ayat

³⁶ Elias, G. Kazarian, Islamic Versus Tradisional Banking, Financial Inovation in Egypt Boulder, dalam Sutan Remy Sjahdeini (Nestview Press, 1993 hal 48), Op. Cit hal 6

39. Ayat-ayat tersebut diatas masing-masing menentukan mengenai larangan riba yang bunyinya sebagai berikut :

a. Surat An-Nisa' ayat 29 dan 161 :

1. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (QS.An- Nisa:29).*
2. *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang diantara kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (Ayat 161).*

b. Surat Ar-Ruum ayat 39 :

Dalam sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Adapun larangan riba dalam Hadits tersurat dalam amanat terakhir Rasulullah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, beliau menekankan pelarangan riba. Beberapa Hadist Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pelarangan riba diantaranya adalah :³⁷

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan".

³⁷ Kesemua Hadits tersebut dikutip dari Terjemahan Subulussalam Rab Riba Hal 125 -

3.3. Alasan Pembena Pengambilan Bunga

Walaupun secara jelas ayat-ayat dalam Al Quran maupun Hadits, melarang adanya riba (bunga bank), namun masih saja ada cendekiawan yang berusaha mencari alasan untuk membenarkan pengambilan bunga. Diantara alasan yang sering digunakan untuk menghalalkan bunga adalah seperti :³⁸

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

Dalam arti belum beroperasinya bank tanpa bunga (Bank Syari'ah).

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam keadaan darurat Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.

".....Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al Baqarah:173).

2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja, yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi, diperkenankan³⁹.

Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah Ali Imran ayat 130 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan."

³⁸ M. Syafii Antonio, OP.cit, hal. 40

³⁹ Kahar Masyhur, Beberapa Pendapat tentang Riba, (Kalam Mulia, Jakarta:1999), hal.56

B. TINJAUAN TERHADAP BANK SYARIAH

Kelahiran Bank Syariah (Bank Islam) dilandasi bahwa segala sesuatu aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadat), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalat).

Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yaitu mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Firman Allah SWT :

“..... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang” (Al-Maa'idah:418).

Dengan demikian hubungan dalam keseharian termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Al Quran sebagai syariat utama melarang mengenai riba Firman Allah SWT, :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung". (QS. Ali Imron:130).

1. Ruang Lingkup Bank Syariah

1.1. Pengertian Bank Syariah

Di dalam Pasal I ayat (2 dan 3) UU No. 10 Tahun 1998, bahwa Bank Syariah adalah bank umum maupun bank perkreditan rakyat di dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah atau sesuai aturan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada Al QUR'AN, Hadits, Ijma para sahabat dan Qiyas Ulama.

Di dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan pengertian prinsip syariah :

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dari atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

(Pasal 1 ayat 13).

1.2. Pengaturan hukum positif Bank Umum Syariah

Sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 huruf (m) UU No.7 Tahun 1992 juncto Pasal 13 huruf (c) UU No.10 Tahun 1998 dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya baik untuk Bank Umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7

Tahun 1992, diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian di dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan landasan tiukum kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasar prinsip Syariah; melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan berdasar prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usatia bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil di dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa :

Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip hagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip Bagi Hasil.

Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 220/KMK.017/ 1993, tanggal 26 Febuari 1993 tentang Bank Umum, Pasal ayat: (3) menyatakan :

Bagi Bank Umum berdasarkan prinsip Bagi Hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus mercantumkan secara jelas mengenai kegiatan usaha yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

1.3. Landasan Syariah

Landasan syariah sebagaimana tersirat didalam Al Quran, adalah sebagai berikut :

1. Surat Luqman : ayat 34 , artinya :

"Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok."

2. Surat Ali Imran : ayat 130, artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan".

3. Surat Ar-Ruum : ayat 39, artinya :

"Dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah"

4. Al Baqarah : ayat 275-279, artinya :

Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

1.4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah ditinjau dari jenisnya ada 2 macam yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, meliputi :

1. Giro berdasar prinsip wadiah

Sesuai dengan prinsip Al Wadiah, bank dapat menggunakan dana yang berasal dari giro dengan atau tanpa ijin dari nasabah untuk membiayai kegiatan operasi bank. Seluruh keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan giro tersebut menjadi hak milik bank, atas dasar kebijaksanaan bank dapat memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik giro yang besarnya diserahkan kepada bank.

2. Tabungan berdasar prinsip wadiah atau mudharabah.

1. Deposito berjangka berdasar prinsip mudharabah

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2. Penerimaan dana lainnya

Bank bagi hasil juga bisa menerima dana dari bank serta pihak lain atas dasar al Wadiah, Al Mudharabah atau Al Qard ul Hasan, yang berupa zakat, infag, dan sodaqah (ZIS), yaitu :

- a. ZIS yang harus segera disalurkan, dalam hal ini Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai penyalur;
- b. ZIS merupakan titipan dan Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai pengelola dana tersebut, sedang waktu penyaluran terserah Bank Syariah.

b. Melakukan penyaluran dana melalui :

1. Transaksi jual beli berdasar prinsip :
 - a. Murabahah
 - b. Istishna
 - c. Ijarah
 - d. Salam
 - e. Jual beli lainnya
2. Pembiayaan Bagi Hasil berdasar :
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - c. Bagi hasil lainnya
3. Pembiayaan lainnya berdasar prinsip :

- a. Hiwalah
- b. Rahn
- c. Qard
- c. Membeli, menjual dan atau menjamin risiko sendiri surat-surat berharga atas pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli *hiwalah*.
- d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat-surat tagihan yang diterbitkan dengan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
- g. Menyediakan tempat, untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
- h. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain, berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujrah.
- j. Memberikan fasilitas Letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujrah.
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank, sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedang untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, menetapkan bahwa BPR Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi :
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah;
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.
2. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - a. transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 1. Murabahah,
 2. Istishna
 3. Ijarah
 4. Salam
 5. Jual Beli lainnya
 - b. Pembiayaan Bagi hasil berdasarkan prinsip :
 1. Mudharabah
 2. Musyarakah
 3. Bagi hasil lainnya
 - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 1. Rahn
 2. Qardh
 3. Melakukan kegiatan lain sepanjang disetujui Dewan Syariat Nasional.

2. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Pengaturan hukum positif terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 10 Tahun 1998, bahwa :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil keuntungan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴⁰

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, :

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi sebagai berikut :

⁴⁰ Rifaat Ahmad Abdul Karim dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori dan Praktek*, (Gema Insani, Jakarta : 2001), hal 160

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yaitu baik untuk peningkatan produksi maupun untuk keperluan perdagangan.
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas.

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai pihak penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

Prinsip bagi hasil menurut syariah yang sering dipakai adalah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Perjanjian *al-mudharabah* maupun *al-musyarakah* ini keberadaannya diatur di dalam hukum positif sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 menjelaskan bahwa :

prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 PP No. 72 tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan / pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;

- b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 3 PP No. 72 Tahun 1992, bahwa :

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Di dalam suatu hubungan hukum akan menimbulkan aspek-aspek hukum yang merupakan unsur esensiil dalam memecahkan suatu permasalahan. Demikian juga hubungan hukum yang terjadi antara Bank Syariah dan nasabahnya, maka muncul pertanyaan hukum apakah yang akan diberlakukan dalam hal terjadi sengketa antara Bank Syariah yang bersangkutan dengan nasabah pengguna jasa Bank Syariah.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan⁴¹ bahwa hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabah dalam hal terjadi sengketa, diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, karena KUHPerdata merupakan hukum positif.

Ditinjau dari aspek hukum perdata, ada beberapa unsur-unsur pokok yang melandasi pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini dalam Neni Sri Imaniati, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah*, (Seminar Nasional, UNISBA, Bandung, 2000), hal 10

syarat sahnya perjanjian. Disamping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian adalah sah, apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan ketertiban umum, serta dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (pasal. 1338 KUHPERDATA). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan dan ketertiban umum.

2.1 Hubungan hukum antara Bank (*shahibul maal*) dengan nasabah berdasar perjanjian al mudharabah

Perjanjian *Mudharabah*, adalah suatu kegiatan perbankan Islam yang merupakan *trust finance* atau pembiayaan berdasarkan kepercayaan.⁴²

Dalam terminologi hukum, mudharabah adalah suatu kontrak, di mana suatu kekayaan atau persediaan stok tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain, untuk membentuk suatu kemitraan, di mana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Dengan kata lain Al-mudharabah adalah suatu bentuk kontrak kerjasama usaha antara

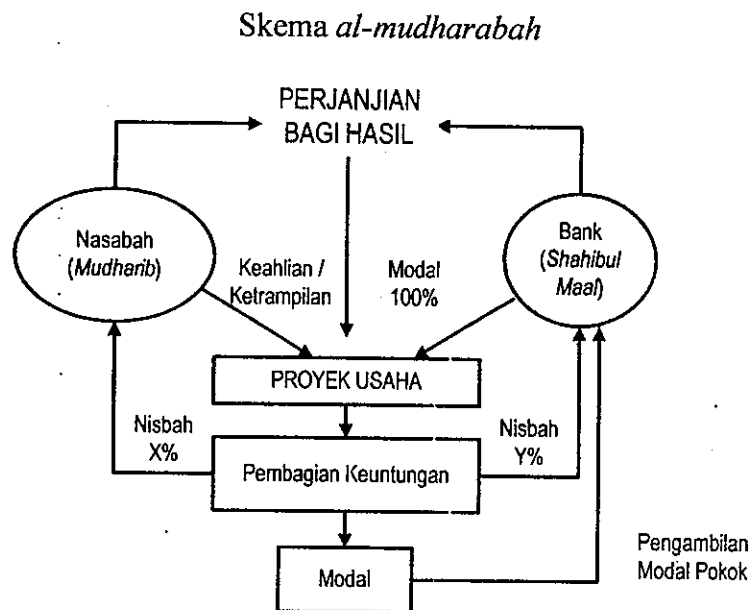
⁴² Adi Bastian Salam, *Kedudukan Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jurnal Penelitian Hukum, Edisi X Januari, 2000, Bengkulu), hal 18

dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola, sebaliknya apabila pengelola lalai harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum perjanjian *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 1.



Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al-mudharabah* sebagaimana tersebut dalam skema di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum

tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al-mudharabah*, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

1) Hak dan kewajiban Bank (*Shahibul maal*) yaitu :

- (a) berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan mudharib (pengelola usaha);
- (b) berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan;
- (c) berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
- (d) berhak untuk membuat usulan dan pengawasan.

2). Hak dan kewajiban Mudharib, yaitu :

- (a) berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha;
- (b) berkewajiban menanggung kerugian managerial skill, dan waktu, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi, hasil yang akan diperolehnya;
- (c) berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank;

3). Berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati.

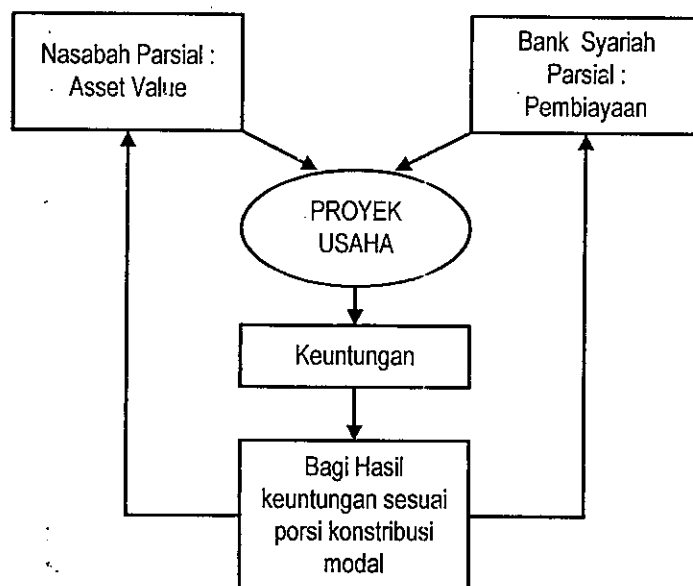
2.2 Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dengan berdasar perjanjian al-musyarakah

Perjanjian *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan penyertaan modal, di mana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi.

Dengan kata lain al-musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha di mana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing.

Secara umum, perjanjian al-musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2. Skema al-musyarakah



Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al-musyarakah* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban nlaupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al-musyarakah*, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bank, (*shahibul maal*)
 - a) berkewajiban membiayai suatu usaha;
 - b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
 - c) berhak ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;
 - d) berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
 - e) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

2. Hak dan kewajiban mudharib, yaitu :

- a) berkewajiban memberikan kontribusi dana atau menyertakan modalnya pada suatu usaha;
- b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
- c) berhak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;
- d) untuk untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
- e) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdara.

Oleh karena itu berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian (asas kebiasaan).⁴³

Menurut Pasal 1347 KUHPerdara, hal-hal yang menurut kebiasaan yang selamanya diperjanjikan secara diam-diam, dianggap telah dimasukkan pula ke dalam perjanjian itu, meskipun hal yang demikian itu tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

⁴³ Sultan Remy Sjahdeini dalam Neni Sri Imaniati, op. cit, hal 11

Mengkaji dari aspek hukum jaminan, Pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (23) UU No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip Syariah.

Ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa agunan atau jaminan di berlakukan dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Secara umum Undang-undang sudah mengatur tentang jaminan yang dikenal dengan asas umum hukum jaminan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1131 Dalam KUHPerdara, bahwa :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil, mengandung risiko, sehingga perlunya bank syariah menambahkan adanya agunan sebagai jaminan. Sebagaimana tersirat di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 283 :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

Disamping harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasar prinsip syariah, dalam arti keyakinan atau kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri berdiri tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi tanggal 1 November 1999. Bank Syariah Mandiri mempunyai 41 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, 33 kantor kas dan 33 ATM dengan jumlah karyawan 1.377 karyawan di seluruh Indonesia.

Bank Syariah Mandiri lahir sebagai hasil kerjasama antara PT. Bank Sosila Bakti dengan PT. Bank Mandiri. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/Kep.BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Sosila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Indonesia No. 1/1/KEP.DES/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Sosila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Kegiatan Bank Syariah Mandiri

Secara umum operasional Bank Syariah Mandiri dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian : ⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Ahmad Suyudi, Account Manager, tanggal 16-8-2005

- a. Tabungan, Giro dan deposito
- b. Pembiayaan
- c. Pembiayaan perdagangan
- d. Pelayanan lain

Keempat jenis operasional ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak syariah Islam. Apabila diperhatikan setiap jenis operasional ini, maka boleh saja melahirkan berbagai produk, dan yang paling penting masing-masing jenis pengoperasian dan produknya tidak boleh keluar dari prinsip Syariah.

- a. Tabungan, giro, deposito

Bank Syariah Mandiri menerima deposit dari nasabah melalui beberapa jenis rekening, diantaranya :

- 1) Rekening giro;
- 2) Rekening tabungan mudharabah;
- 3) Deposito *mudharabah mutlaqah*;
- 4) Deposito *mudharabah muqayyadah*.

Rekening tersebut di atas, dioperasikan dengan kontrak wadiah dan *mudharabah*.

Dalam pengoperasiannya memakai instrumen kontrak wadiah, yang dimaksud dengan wadiah adalah mewakilkan kepada orang lain untuk memelihara hak milik. Simpanan giro ini pada dasarnya adalah

titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek, pemindah bukuan atau transfer dari perintah membayar lainnya. Pada simpanan giro ini dikenakan biaya administrasi. Namun karena dana yang tersimpan di bank diizinkan untuk diputar oleh bank, maka kepada penyimpan dana dapat diberikan semaram bonus atau jasa giro, sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bank.

Selanjutnya, Bank Syariah Mandiri dalam pengoperasiannya juga memakai instrumen kontrak *Mudharabah*. Mudharabah merupakan simpanan pemilik dana bank yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam pengoperasiannya ada dua bentuk, pertama bank diberi kebebasan untuk menginvestasikan di mana saja yang dapat memberi keuntungan. Dalam hal ini bank sebenarnya berfungsi sebagai perantara antara pemodal dan pengusaha. Sebagai perantara bank berhak mendapat persentase khusus dari Mudharabah yang dilaksanakan. Pada dasarnya pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pemodal, yang penting persentasenya ditetapkan dari awal.

Bentuk sistem Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri adalah penyimpanan uang nasabah di bank, kemudian bank bertindak langsung sebagai pengusaha dengan melakukan berbagai bentuk transaksi perdagangan seperti murabahah, dan musyarakah. Nisbah keuntungan

juga sama seperti yang pertama. Dalam pengoperasiannya Bank Syariah Mandiri tidak melaksanakan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabungan Mudharabah, tabungan ini merupakan simpanan pemilik dana pada bank yang penarikannya hanya dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan hak untuk memperoleh bagian laba bank (80 % untuk penyimpan dana dan 20 % untuk bank) yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank.

b. Pembiayaan

Bank Syariah Mandiri dalam kegiatannya selalu terlibat dengan berbagai jenis kontrak-kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah.

Diantara jenis kontrak yang dioperasikan adalah :

- 1) *Al-Mudharabah*
- 2) *Al-Musyarakah*

c. Pembiayaan Perdagangan

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan modern, menawarkan berbagai produk yang menarik untuk dimanfaatkan oleh para nasabah. Pelayanan yang diberikan komprehensif, baik untuk pembiayaan jangka panjang maupun untuk pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk putaran modal bagi para pelaku bisnis.

Antara Pembiayaan perdagangan yang telah dibuatkan produknya adalah sebagai berikut.

1. Surat kredit (letter of credit) dibawah prinsip alwakalah, al-musyarakah, dan al-murabahah.
2. Surat jaminan.
3. Pembiayaan modal kerja dibawah prinsip al-murabahah.

Ad. 3.1. Surat Kredit

Apabila para pedagang melakukan transaksi ekspor atau impor memerlukan surat kredit, agar transaksi mereka berjalan lancar, atau masing-masing pelaku bisnis dapat melayani transaksi yang mereka lakukan, hingga kekhawatiran tidak muncul antara sesama mereka. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri menyediakan beberapa bentuk fasilitas kontrak.

3.1.1. Surat kredit dibawah Prinsip Al-Wakalah.

Al-Wakalah adalah menyerahkan wewenang kepada seseorang untuk menjalankan tugas yang akan dilakukan oleh seorang yang punya wewenang untuk itu. Contoh dalam hal ini adalah Sdr. C mewakilkan kepada Sdr. D untuk membeli sekilo emas, Sdr. D membeli dan kemudian menyerahkan emas yang dibeli kepada Sdr. C dalam hal telah terjadi sesuatu yang disebut Al-Wakalah. Alwakalah ini dibenarkan oleh Islam sepanjang dipenuhi rukun dan syariatnya.

Dalam praktek surat kredit dengan prinsip Al-Wakalah ini dapat dilakukan oleh nasabah dengan Bank Syariah Mandiri, apabila nasabah mohon untuk dibuatkan surat kredit, maka bank akan membuatkan dan meminta nasabah menyediakan deposit sepenuhnya menurut harga barang yang akan diimpor. Deposit itu dapat diterima dalam bentuk Wadiah, bank hanya akan menggunakan komisi kepada nasabah di bawah elemen kontrak al ujr wa al-umlah.

3.1.2. Surat kredit di bawah prinsip Al-Musyarakah

Dalam perdagangan impor dan ekspor, para pelaku bisnis selalu menggunakan Surat Kredit (LC). Bank Syariah Mandiri menawarkan kontrak perdagangan seperti ini kepada nasabah dibawah elemen kontrak Al-Musyarakah.

Caranya adalah dalam pembayaran barang yang akan dibeli oleh nasabah, ia berkongsi dengan bank. Untuk penjualnya diserahkan kepada nasabah dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara pihak bank dan nasabah menurut porsi yang disepakati bersama. Untuk keperluan ini nasabah tidak perlu diberatkan dengan koleteral.

3.1.3. Surat Kredit dibawah Prinsip Al-Murabahah.

Bagi nasabah yang tidak memiliki modal yang cukup dapat menggunakan elemen kontrak Al-Murabahah dalam melaksanakan

transaksinya. Kontrak ini akan memberikan peluang kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu barang dengan pembayaran secara bertanggung.

Dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri dapat membelikan dan mengimpor barang sebagaimana yang dikehendaki oleh nasabah. Setelah barang itu dibeli oleh bank, nasabah akan membelinya dengan kontrak Al-Murabahah dan pembayarannya akan dilakukan oleh nasabah di kemudian hari.

Kontrak seperti ini oleh Bank Syariah Mandiri diaplikasikan dalam berbagai produk pembiayaan perdagangan. Nasabah meminta bank menyediakan pembiayaan untuk keperluan putaran modal bagi pembelian suatu barang, barang-barang mentah atau alat ganti. Semua pembayaran akan dilakukan oleh bank, nasabah boleh membayarnya kepada bank dengan pembayaran ditangguhkan, setelah sampai masa jatuh temponya, nasabah akan membayar kepada bank sebesar harga yang telah disetujui.

Ad. 3.2. Surat Jaminan

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap masyarakat muslim itu hendaklah membantu sesamanya. Oleh karena itu apabila seseorang memerlukan orang lain untuk menjamin dirinya agar dapat dipercaya dalam memegang suatu amanah atau urusan, maka ia memerlukan penjamin atau disebut Al-kafalah.

Jaminan artinya mau bertanggung jawab terhadap sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang lain secara hukum. Jaminan ini terbagi atas dua, yaitu :

Pertama, jaminan ke atas diri (kafalah bi a-nafs), seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang tertuduh dihadapan Mahkamah; *kedua*, jaminan atas harta (al-kafalah bi al-dark) , seperti pejaminan atas utang seseorang, keselamatan barang, penyerahan barang, pembayaran harga barang yang dijual. Jenis inilah yang dipakai oleh Bank Syariah Mandiri.

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri dapat mengeluarkan surat jaminan untuk mengusahakan sesuatu proyek dan melunasi pinjaman. Untuk itu bank boleh meminta nasabah meletakkan sejumlah uang deposit di bawah kontrak al-waidah. Keuntungan bank dengan menggunakan elemen kontrak seperti ini adalah mendapatkan bayaran dari nasabah berupa fee atau upah melalui kontrak ujir.

Ad. 3.3. Pembiayaan Modal Kerja di bawah kontrak Murabahah.

Biasanya masyarakat kalau membuka suatu usaha atau aktivitas bisnis memerlukan modal. Bank Syariah Mandiri bisa membiayai modal kerjanya dengan menggunakan kontrak Al-Murabahah. Contohnya Sdr. E adalah dokter gigi. Ia ingin membuka tempat praktek, sehingga ia memerlukan modal. Bank dapat membantunya untuk mendapatkan tempat dan peralatan yang ia perlukan, kemudian bank menjualnya kepada sdr. E

dengan harga dasar ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Produk Al Murabahah yang dijual oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah, pada dasarnya tidak memerlukan koleteral atau agunan, sebab ia telah dicatat dan ditulis secara jelas, dan nasabah yang diberi fasilitas seperti ini bukanlah nasabah lain, melainkan nasabah yang sudah dapat dipercaya kredibilitasnya.

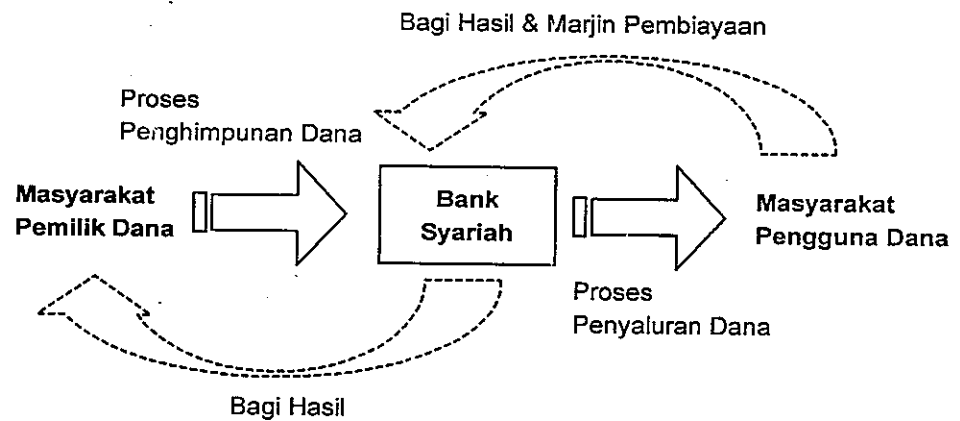
Ad. 3.4. Pelayanan lain

Pada hakekatnya Bank Syariah Mandiri dapat melayani berbagai keperluan yang diinginkan oleh masyarakat selagi ada unsur komersialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Umpamanya pelayanan pengiriman uang, pelayanan penukaran uang asing (jual beli valuta asing), pelayanan pembayaran telepon, listrik, air, jual beli traveller cheque, jasa penyewaan safe keeping/deposit box dan lain-lain.

Pelayanan tersebut di atas beroperasi dalam elemen kontrak *al-ijarah*. Bank hanya mengenakan upah atau *service charge* kepada nasabah karena hanya elemen inilah yang sesuai diterapkan.

Gambar 3.

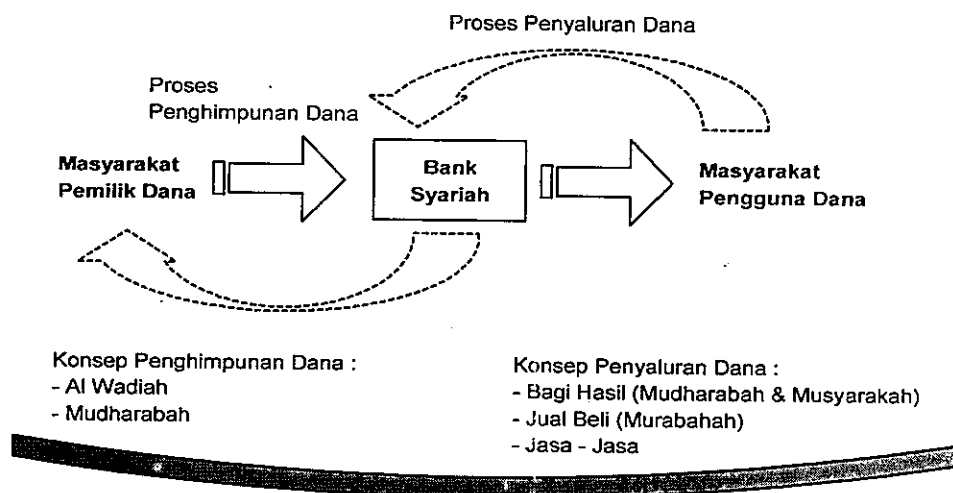
Konsep dan Sistem Perbankan Syariah



Gambar (4) di atas, menunjukkan bahwa dalam sistem perbankan syariah, di dalam proses penghimpunan dana maupun proses penyaluran dana berdasarkan pada prinsip bagi hasil, sesuai nisbah yang telah di sepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini bank syariah tidak akan menanggung beban yang begitu berat, disinilah tercermin asas keadilan.

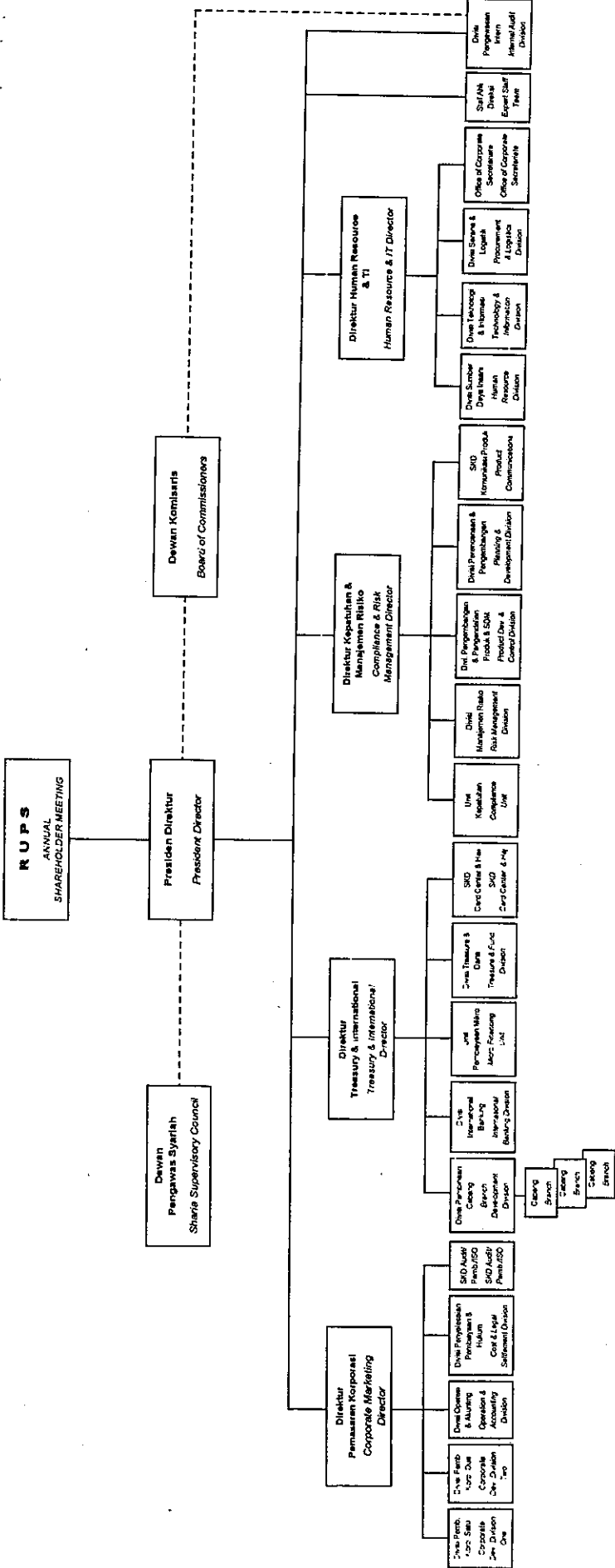
Gambar 4.

Konsep Produk Perbankan Syariah



Gambar (5) tersebut di atas, bahwa produk bank Syariah yaitu di dalam proses penghimpunan dana mendasarkan pada prinsip al-wadiah dan al-mudharabah dan di dalam proses penyaluran dana mendasarkan pada prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah); jual beli (murabahah) serta jasa-jasa.

STRUKTUR ORGANISASI



A. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri dalam melakukan usahanya menetapkan imbalan jasa yang diterima nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dikenal dengan istilah Bank tanpa bunga. Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan bagi hasil menggunakan dua prinsip yaitu prinsip Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah.

1. Prinsip Al-Mudharabah

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat antara dua pihak, di mana di satu pihak akan menyediakan dana raja (shahihul maal), sedangkan di pihak lain memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (mudharib). Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.

Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

Keberadaan al-mudharabah didasarkan pada

- (1) Al Quran Surat Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya
Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT.
- (2) Hadist Rasulullah saw, yang berbunyi :
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidan Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu paru basah. jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Beliaupun memperkenankannya.

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan

Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhah (Mudharabah); (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

1.1 Pengertian Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁵

Pengertian al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya

⁴⁵ Muhammad Rawas Qol'aji, dalam M. Syaifi Antonio, Ibid, Hal. 95

menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁶

Mudharabah dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat) antara dua pihak, di mana di satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibulmal*), sedangkan di pihak lain yang memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (*Mudharib*). Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

⁴⁶ Ibid, hal. 9

1.2. Landasan Syariah

Landasan dasar syariah Al-Mudharabah mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Al-Hadits, berikut ini:

a. Al Quran

- (1) Al Qur'an Sur at Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya

"Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT"

- (2) Al Quran Surat al-Jumuah (10) yang artinya

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT"

b. Hadits Rasulullah SAW

- (1) Hadits Rasulullah SAW

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Beliau pun memperkenankannya".

- (2) Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan

"Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : "tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhadh (Mudharabah); (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual" (HR.Ibnu Majah No.2280, Kitab at-Tijarah)

c. Ijma

Imam Zailai⁴⁷ telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah.

1.3 Jenis-jenis Al-Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlagah* dan *mudharabah mugayyadah*.

a. *Mudharabah muthlagah*

Transaksi *mudharabah muthlagah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.⁴⁸

b. *Mudharabah Mugayyadah*

Mudharabah mugayyadah atau disebut istilah *restricted mudharabah* / *specified mudharabah* adalah kebalikan dari

⁴⁷ Nasbu ar-Rayah IV, dalam M. Syafi'i Antonio, Ibid, hal. 96

⁴⁸ Ibid, hal. 97

mudharabah muthlagah. Dalam hal ini mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Mahmoud al-Anshari, membedakan prinsip mudharabah ini dalam beberapa jenis, yaitu :⁴⁹

- a. Mudharabah khusus, yaitu pemberian dana oleh seseorang, sementara itu usaha mudharabah dilakukan oleh seorang, sebagai individu atau hadan hukum;
- b. Mudharabah berserikat, yaitu dalam hal ini bank-bank menerima dana dari berbagai sumber untuk kemudian dipergunakan dalam bentuk mudharabah.
- c. Mudharabah mutlak, yaitu penerima dana (mudharib) memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya. Lain ada persyaratan-persyaratan tertentu dari pemilik dana, misalnya bentuk perdagangan atau usaha lainnya, waktu lainnya dan tempat pelaksanaan kegiatan. Mudharib dalam hal ini menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya di samping mendapat keuntungan.
- d. Mudharabah bersyarat, yaitu kebalikan dari mudharabah mutlak di mana pemilik dana menentukan syarat-syarat yang

⁴⁹ Mahmūd Al Anshari, Perbankan Islam, terjemahan Minaret 1993, hal. 96

harus dipatuhi oleh mudharib dalam pengelolaan dana yang diterimanya.

1.4. Manfaat dan Risiko Al Mudharabah

Manfaat Al- Mudharabah

- (a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- (b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- (d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;
- (e) Prinsip bagi hasil mudharabah maupun musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap

berapapun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam al – mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
3. Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

2. Prinsip Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha - tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing dan berhak untuk ikut serta, mewakilkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Dasar hukum prinsip Musyarakah dapat dilihat dalam :

- (1) Al Quran Surat A-Shad (38) ayat 24 yang artinya

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang-yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh "

(2) Dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi

"Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu." (HR. Abu Daud).

2.1 Pengertian Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁰

Sistem musyarakah ini merupakan konsep dasar bank syariah. Dalam hal ini hubungan yang terjadi antara hank dan nasabah merupakan hubungan kerjasama bukan hubungan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana halnya dalam praktek bank-bank konvensional.

2.2. Landasan Syariah

Dasar hukum prinsip Musyarakah dapat dilihat dalam

(1) Al Quran Surat A-Shad (38) ayat 24 yang artinya

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh"

⁵⁰ Bidayatul Mutjahid II dalam M. Syafi'i Antonio, ibid, hal. 90

(2) Dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi

"Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu "(HR. Abu Daud).

(3) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughni*⁵¹ telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen.

2.3. Jenis jenis Al-Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil secara musyarakah, ada dua jenis, yaitu *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kendisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan aset oleh dua orang atau lebih dengan berbagi keuntungan dari hasil aset tersebut. Sedang musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah, sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

⁵¹ Abdullah Ibn Qudamah, *Mughni wa Syarh Kabir*, dalam M. Syafi'i Antonio, *ibid*, hal.91

Musyarakah akad terbagi menjadi

(a) Syirkah al-Inan

Syirkah al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama;

(b) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan, suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

(c) Syirkah Amaal

Al-musyarakah jenis ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

(d) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah suatu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Dalam usaha tersebut, mereka membeli barang

secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Dalam kesepakatan tersebut mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.⁵²

2.4 Manfaat dan Resiko Al-Musyarakah

Manfaat Al - Musyarakah

- (a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
- (d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;

⁵² Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani dalam M. Syafi'i Antonio, ibid, hal. 93

- (e) Prinsip bagi hasil mudharabah maupun musyarakah dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam al-musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu

- (a) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (c) Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

3. Prinsip – prinsip dalam kegiatan operasional Bank Syariah

Kegiatan operasional Bank Syariah menurut Pedoman Bank Indonesia, pada:⁵⁷

1. Prinsip Al Wadiah (simpanan)

Al Wadiah merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk Bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

⁵⁷ Dahlan Siamat Manajemen Bank Bagi Hasil, (Intermedia: Jakarta, 1995), hal. 124

2. Prinsip Al Mudharabah

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat antara dua pihak, di mana di satu pihak akan menyediakan dana saja (shahibul maal), sedangkan di pihak lain memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (mudharib).

3. Prinsip Al Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau modal) untuk membiayai suatu usaha dimana masing – masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak – pihak tersebut sesuai dengan porsi penyertaan modal masing – masing dan berhak untuk ikut serta, mewakilkan dalam pelaksanaan atau manajemen usah tersebut.

4. Prinsip Al Murabahah dan Al Bai'bitsaman'ajil

Prinsip Murabahah (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran sekaligus atau tangguh) diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang di sepakati dengan system pembayaran tangguh.

5. Prinsip Al Ijarah dan Al Bai' Takjiri

Prinsip al ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan persetujuan kedua pihak.

6. Prinsip Al Qardh ul Hasan

Prinsip ini merupakan perjanjian pinjam – meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.

7. Prinsip Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

8. Prinsip Al Hiwalah

Prinsip ini adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya prinsip ini merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam syariah.

9. Prinsip Al Rahn⁵⁸

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan dalam syariah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

10. Prinsip Al Wakalah

Prinsip ini merupakan suatu lembaga pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atau kerja atas nama pemberi kuasa.

11. Prinsip Sharf

Prinsip ini merupakan suatu lembaga perjanjian jual beli uang dengan uang yang sejenis. Apabila yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama, dan penyerahan juga dilakukan pada waktu yang sama.

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya*, Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Pustaka Utama, Grafiti : Jakarta, 1999), hal. 76

B. Penerapan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Nasabah Bank Syariah Mandiri Semarang

Di bidang penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Syariah Mandiri Semarang memberikan jasa-jasa kegiatan pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Al-Mudharabah

Pembiayaan Al-Mudharabah yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100 % pembiayaan bagi usaha tertentu (meliputi bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga) dari nasabah. Nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari Bank Syariah Mandiri. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawaan. Atas penyediaan dana pembiayaan tersebut Bank Syariah Mandiri mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah Mandiri, kecuali apabila kerugian akibat dari kelalaian nasabah pengelola usaha.

Keberadaan perjanjian pembiayaan al-mudharabah didasarkan pada :

(1) Al Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya :

.... Dan sebahagian dari Mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT.

(2) Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi :

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidan Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Beliauapun memperkenankannya.

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan :

Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhah (Mudharabah); (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Pada skim perjanjian Mudharabah (yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan usaha untuk (selanjutnya disebut mudharib) dengan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai pihak yang menyediakan dana (untuk selanjutnya disebut shahibul maal), bahwa Mudharib dalam rangka menjalankan kegiatan dan memperluas usahanya memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal ini telah meminta Bank Syariah Mandiri untuk memberikan pembiayaan yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (mudharabah) dan Bank Syariah Mandiri menyetujui untuk menyediakan pembiayaan tersebut kepada Mudharib sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Mudharabah. Sebagaimana

dinyatakan oleh Mariam Darusbadruzaman⁵⁹ bahwa perjanjian bagi hasil di terapkan antara bank dengan nasabah tanpa memperhitungkan bunga, perjanjian ini dalam sistem hukum perdata termasuk lingkup perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian bersama di luar KUH Perdata.

Kedua belah pihak (Bank Syariah Mandiri dan Mudharib) telah sepakat bahwa untuk maksud tersebut kedua belah pihak menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil.

1.1. Syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil

Syarat-syarat dari ketentuan bagi hasil sebagai berikut :

- a) Bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara Bank Syariah Mandiri dan Mudharib yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama, yakni pendapatan dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya.
- b) Pendapatan, yang dimaksud adalah bahwa Bank Syariah Mandiri dan Mudharib setuju mengenai pembiayaan secara bagi hasil bahwa pendapatan yang didapat dari usaha Mudharib tersebut akan dibagi dengan nisbah 25 % untuk Bank Syariah Mandiri dan 75 % untuk Mudharib, sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos.

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*, (Elip, Jakarta, 1998), hal 28

Pendapatan yang dibagi tersebut dapat dihitung sebagai pengembalian pembiayaan pokok dan pendapatan Bank Syariah Mandiri yang telah tercantum dalam daftar pembayaran. Namun apabila dalam masa berlakunya perjanjian ini terjadi fluktuasi atau perubahan yang mengakibatkan pada akhir masa perjanjian, Mudharib mengalami kerugian, sehingga proyeksi keuntungan sebagaimana telah ditetapkan (25 % untuk Bank Syariah Mandiri dan 75 % untuk Mudharib) di atas menjadi tidak terpenuhi bagi salah satu pihak, maka pembagian pendapatan yang telah diperhitungkan/diterima Bank Syariah Mandiri akan dihitung kembali pada setiap kuartal setelah diterimanya laporan akuntan publik, yang disebut pada setiap bulan.

Dalam hal tidak ada pendapatan atau bahkan merugi, maka penutupan kerugian tersebut diambil dari jumlah pokok pembiayaan yang di atur. sebagai berikut sebagaimana tersebut dibawah ini.

c) Dalam hal terjadi kerugian :⁶⁰

Bank Syariah Mandiri hanya akan menanggung kerugian yang timbul disebabkan karena hal-hal di luar batas kemampuan

⁶⁰ Baharudin, Wawancara Pribadi, bagian hukm, tanggal 16 Agustus 2005

Mudharib (force majeure). Dengan tidak mengurangi dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 KUHPerdata.

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Selanjutnya Pasal 1245 KUHPerdata :

Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebutuhan, debitur berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada Mudharib untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Shahibul Maal (Bank Syariah Mandiri), oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan Mudharib untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yaitu :

- a) Perang, pengambil-alihan (baik yang diumumkan atau tidak), pendudukan, tindakan negara atas musuh, kerusuhan masal dan sabotase;

- b) Bencana alam, termasuk tapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, halilintar, pergerakan tanah, dan keadaan cuaca yang sangat buruk.
- c) Pemogokan buruh yang menyebabkan terganggunya usaha yang timbul bukan karena kesalahan Mudharib atau kontraktornya atau sub kontraktornya.

Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana tersebut di atas, maka Bank Syariah Mandiri akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai kembali dan menyampaikan hasil penilaiannya secara tertulis kepada Mudharib yang berisi laporan keuangan dari konsultan yang telah diaudit oleh akuntan publik, pernyataan dari pengurus perusahaan-perusahaan secara tertulis yang disampaikan kepada Bank Syariah Mandiri mengenai kerugian tersebut, dan dokumen-dokumen yang sah yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri hanya akan menangqung kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan pada Mudharib.

Menurut para ahli *figh* pengikut Hanafi, dalam syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertertua juga wajib membagi keuntungan kepada pihak

yang memperoleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat.⁶¹

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam perjanjian, Bank Syariah Mandiri baru berkewajiban memberikan pembiayaan kepada Mudharib, jika telah dipenuhi semua prasyarat sebagai berikut :⁶²

- a) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penggunaan pembiayaan, Bank Syariah Mandiri telah menerima semua dokumen yang diuraikan, dalam lampiran yang dilihatkan (dilampirkan) pada minit akta perjanjian (semua dalam bentuk dan isi yang di setuju Bank Syariah Mandiri).
- b) Telah dibuat perjanjian jaminan dan telah di tandatangani sebagaimana mestinya baik asli atau salinan resminya telah diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri, yaitu :
 - (a) Pemberian jaminan pribadi (termasuk jaminan dari para pemegang sahamnya atau lainnya);
 - (b) Pemberian jaminan Mudharib (termasuk jaminan dari afiliasinya);
 - (c) Fidusia atas barang-barang bergerak milik mudharib;
 - (d) Hak Tanggungan atas tanah-tanah Mudharib;
 - (e) Cessie atas piutang-piutang Mudharib.

⁶¹ M. Nejatullah Siddiqi, terjemah, Fakhriyah, Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, Yogyakarta, 1996, hal. 19

⁶² Baharudin, Wawancara Pribadi, bagian hukm, tanggal 16 Agustus 2005

- c) Surat pernyataan dan kesanggupan telah dibuat dan ditandatangani dengan sebagaimana mestinya dan asli asli atau salinan resminya telah diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri.
- d) Bank Syariah Mandiri telah menerima dokumen, pernyataan, pendapat dari segi hukum atau akta lain yang secara wajar diminta oleh Bank Muamalat.

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Mudharib harus menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a) Status Mudharib :

Mudharib adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri secara sah dan tunduk pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia.

- b) Keberadaan Mudharib, pada saat di tandatangannya perjanjian, Mudharib adalah tidak dalam keadaan dibubarkan atau dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47

KUHD, bahwa:

Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar limapuluh persen dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register yang diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dalam Berita Negara.

c) Kuasa dan kewenangan

Direksi Mudharib adalah berkuasa dan berwenang untuk menandatangani melaksanakan perjanjian pembiayaan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian pembiayaan. Direksi Mudharib telah mengambil segala tindakan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Mudharib atau aturan lainnya yang memberikan kuasa kepada direksi untuk menandatangani, menyampaikan, menerbitkan dan menjalankan perjanjian pembiayaan, surat sanggup dan perjanjian lainnya.

d) Perjanjian mengikat

Perjanjian pembiayaan (termasuk berikut perubahan-perubahannya, penambahan atau pengurangan ataupun dokumen-dokumen yang terpisah maupun yang tidak dari perjanjian pembiayaan berlaku dan mengikat Mudharib.

e) Peraturan-peraturan yang berlaku, penandatanganan, penyampaian penerbitan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan surat sanggup tidak atau tidak akan menyimpang dari setiap ketentuan dari peraturan-peraturan yang berlaku Negara R.I atau Anggaran Dasar Mudharib atau perjanjian jaininan atau dokumen-dokumen atau perjanjian-

perjanjian lain yang mengikat Mudharib atau mengikat aset Mudharib.

f) Persetujuan,

Semua persetujuan, lisensi atau perjanjian dari pihak yang berwenang yang dimintakan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani, menyampaikan, menerbitkan, melaksanakan, untuk sah dan berlakunya perjanjian pembiayaan adalah telah diperoleh oleh Mudharib.

g) Ligitasi

Tidak terdapat proses ligitasi, arbitrase atau administrasi terhadap Mudharib oleh pihak yang berwajib atau oleh pengadilan saat ini atau yang sedang ditunda yang mempengaruhi aset, usaha dan keadaan keuangan Mudharib.

h) Perijinan,

Mudharib memiliki semua perijinn yang berlaku untuk menjalankan usahanya.

i) Keterangan Mudharib,

Keterangan mengenai akta pendirian Mudharib, Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham

· sebagaimana yang digambarkan dalam lembar keterangan

· Mudharib adalah benar dan tepat.

- j) Penandatanganan perjanjian, adalah orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama Mudharib serta mendapat kuasa dari Mudharib adalah sah dan berwenang.
- k) Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus Mudharib, Mudharib tidak boleh merubah Anggaran Dasarnya dan pengurusnya tanpa persetujuan tertulis dari Bank Muamalat.
- l) Bank Syariah Mandiri berhak memasuki kantor dan pabrik atau tempat lainnya, untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, transaksi. Mudharib yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- m) Aktiva yang tercantum dalam neraca Mudharib itu bebas dari silang sengketa dengan pihak ketiga.
- n) Tidak akan terjadi klaim (tuntutan) baik dari pihak lain selain yang tercantum dalam neraca tersebut. Namun demikian apabila di kemudian hari terjadi tuntutan seperti itu, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab pribadi-pribadi Mudharib untuk menyelesaikannya, tetapi tidak terbatas pada

utang-utang pajak yang terjadi sebelum perubahan perjanjian pembiayaan ditandatangani.

- o) Kegiatan perusahaan akan tetap dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan, walaupun perubahan Anggaran Dasar Perseroan, karena adanya kerjasama yang belum disetujui oleh pihak yang berwenang.

Syarat pembiayaan bagi hasil (Al-Mudharabah) yang menjadi pertimbangan Magi operasionalisasi Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan Mudharabah adalah :⁶³

- a. Modal Mudharabah harus merupakan mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak penguasa setelah selesai ijab qabul, sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati.
- b. Persentase pembagian keuntungan yang ditentukan hanya untuk satu pihak saja atau menetapkan sejumlah uang dari keuntungan yang akan didapat bagi salah satu pihak adalah tidak sah.
- c. Dasar bagi pembiayaan mudharabah ialah modal berasal dari pihak permodal (Bank Syariah Mandiri) sedang kerja

⁶³ Baharudin, Wawancara Pribadi, bagian hukum, tanggal 16 Agustus 2005

dilakukan oleh pihak pengusaha. Oleh karena itu adalah tidak sah apabila penetapan kerja dilakukan oleh pihak pemodal.

- d. Bila pembiayaan mudharabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, pihak pengusaha menanggung kerugian karena tidak mendapatkan manfaat dari jerih payahnya. Jika usaha tersebut hanya kembali modal, maka modal tersebut sepenuhnya untuk pihak pemodal, sedangkan pihak pengusaha tidak mendapatkan bagian.
- e. Mudharabah dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai oleh pihak pengusaha.
- f. Proyek atau usaha yang dilakukan haruslah usaha yang haial.
- g. Kedua belah pihak yang akan mengadakan mudharabah haruslah cakap dan sah secara hukum untuk melakukan perikatan.
- h. Pengusaha tidak boleh mencampurkan harta mudharabah dengan harta lain atau harta milik pribadi kecuali hal seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan setempat.
- i. Apabila pengusaha hendak menjalankan mudharabah dengan pihak ketiga, di mana pengusaha disini berperan sebagai

pemilik modal pada akad dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak pengusaha diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik modal, dengan syarat pengeluaran tersebut berada dalam batas kewajaran.

- j. Apabila pihak pengusaha dalam menjalankan proyek melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pihak pengusaha bertanggung jawab terhadap semua risiko kerugian dari proyek atau usaha yang tengah di jalankannya dan wajib membayar sepenuhnya modal yang telah diberikan oleh pihak pemodal.
- k. Perjanjian mudharabah selesai dengan habisnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- l. Pihak pemodal, karena sesuatu hal yang membahayakan, berhak memecat pengusaha dengan diberikan peringatan terlebih dahulu.
- m. Apabila terjadi aksi pembatalan mudharabah maka semua modal dan untung adalah menjadi hak pemodal dan pengusaha berhak menuntut upah yang setimpal dengan perhitungan kerja yang telah dijalkannya.
- n. Apabila terjadi suatu kerusakan atau kerugian dalam mudharabah, maka penggantian kerusakan tersebut haruslah

diambil dari keuntungan bila ada, kalau tidak mencukupi baru diambil dari modal. Pihak pengusaha tidak diwajibkan mengganti kerusakan atau kerugian ini kecuali hal tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya.

- o. Perjanjian mudharabah berakhir dengan matinya salah satu pihak.
- p. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat/lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- q. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan tentang usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur kejujuran dapat terbaca, oleh pihak bank.
- r. Peminjam dalam mencicil pinjaman dan bagi hasil harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah.

Tidak seperti halnya yang dilakukan bank-bank konvensional umumnya dalam memberikan kredit, pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan menjembatani kepentingan masing-masing pihak terutama debitur

yang seringkali dirugikan dalam perjanjian kredit di bank-bank konvensional yang umumnya menerapkan perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan mudharabah dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang seringkali melanda usaha mudharib.

Pembiayaan Mudharabah lebih diprioritaskan pada pengusaha kecil dan menengah. Biasanya hambatan yang paling besar bagi pengusaha kecil dan menengah adalah kurangnya modal, minimnya penguasaan teknologi dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Melalui pola pembiayaan mudharabah ini, hambatan-hambatan tersebut diusahakan dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihilangkan sama sekali. Oleh karena itu dalam pembiayaan mudharabah, pihak-pihak yang terlibat adalah :

1. Bank Syariah Mandiri sebagai pihak penyedia dana (*Shahibul Maal*) yang menyediakan pembiayaan.
2. Pengusaha atau para pengelola (mudharib) yaitu orang-orang yang menerima pembiayaan. Mudharib dapat berupa perorangan dan kelompok orang. Mudharib perorangan bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan Mudharib kelompok orang tanggung jawabnya dilakukan secara tanggung renteng artinya semua mudharib mempunyai tanggung jawab yang sama. Salah satu dapat membebaskan perputangan secara keseluruhan.

3. Pihak terafiliasi, yaitu pihak yang memberikan jasa kepada bank, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik dan jasa penilai. (Pasal 1 butir 15 huruf c UU No 7 Tahun 1992).

Peran pihak terafiliasi (konsultan) yang keberadaannya disebutkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah membantu mudharib dalam mengelola usahanya secara lebih baik dan ahli teknologi. Sehingga diharapkan tingkat produksi akan meningkat tanpa mengesampingkan aspek analisis dan evaluasi secara perbankan. Adanya penyebutan pihak terafiliasi dalam perjanjian Mudharabah karena antara Bank Syariah Mandiri dengan konsultan telah terjadi perjanjian kerja sama sebelumnya. Sedangkan bagi mudharib, keberadaan konsultan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah sangat menguntungkan, karena mudharib dapat belajar untuk mengelola usahanya secara profesional dengan mendapatkan bimbingan orang yang ahli dan menguasai dibidang usaha yang ditekuni mudharib.

1.3. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah

Berakhirnya perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah dalam praktek Bank Syariah Mandiri, adalah sebagai berikut :

1. Mudharib telah membayar lunas pembiayaan yang telah diterimanya;

2. Bank (Shahibul Maal) membatalkan perjanjian pembiayaan Mudharabati, karena mudharib terbukti melakukan wanprestasi yang diikuti dengan adanya tuntutan dari Bank terhadap pembiayaan mudharahah yang telah diterima dari bank (shahibul maal).
3. Obyek dari pembiayaan musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan mudharib atau disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure), seperti obyek pembiayaannya musnah karena bencana alam;
4. Proyek usaha mudharib yang dibiayai bank (shahibul maal) mengalami kerugian total (total loss), sehingga mudharib tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaannya kepada bank (shahibul maal). Hal ini terjadi karena keadaan meinkaksa (force majeure), seperti proyek usaha mudharib tertimpa bencana alam;
5. Bank (shahibul maal) mengakhiri pembiayaan apabila usaha mudharib terus-menerus mengalami kerugian. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dalam analisis pembiayaan, produk yang dihasilkan mudharib tidak marketable dan sulit untuk dikembangkan untuk produk lain., adanya deregulasi atau peraturan pemerintah yang menghambat pemasaran dari usaha

mudharib atau menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.

1.4. Manfaat pembiayaan Al- Mudharabah

- (a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- (b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- (d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;
- (e) Prinsip bagi hasil mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

- (a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (c) Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2. Pembiayaan Al Musyarakah

Pembiayaan Al-Musyarakah yaitu satu perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah di mana Bank Syariah Mandiri menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lainnya disediakan oleh mitra usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing.

Dasar hukum prinsip Musyarakah dapat dilihat dalam :

(1) Al Qur'an Surat A-Shad (38) ayat 24 artinya :

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ... "

(2) Dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

"Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu" (HR. Abu Daud).

Dalam skim perjanjian pembiayaan al-musyarakah (yang selanjutnya disebut perjanjian) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah (Mudharib), bahwa mereka masing-masing telah setuju untuk membuat perjanjian pembiayaan musyarakah dengan memakai syarat dan ketentuan bagi hasil.

2.1. Syarat dan ketentuan bagi hasil sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri bersepakat kepada mudharib bahwa bank akan :

(a) Menyediakan seluruh pembiayaan modal aset dan pembiayaan modal kerja berdasarkan perjanjian pembiayaan al-musyarakah ke rekening giro mudharib pada tanggal pencairan.

(b) Setiap hal yang berkaitan dengan penetapan kebijaksanaan yang menyangkut proyek akan dikonsultasikan kepada nasabah pada setiap kondisi yang dibutuhkan, agar menjamin penerapan dari perjanjian pembiayaan al-musyarakah adalah benar, tetapi tidak ada keharusan bagi Bank Syariah Mandiri untuk bermusyawarah bagi sesuatu yang menyangkut hak bank.

2. Kompensasi bagi Mudharib, adalah :

(a) Mudharib akan menyediakan pelayanan teknis manajemen dan pengeluaran seperti yang tertera pada lampiran khususnya dalam perubahan partisipasi pembagian pendapatan dan diberikan hak kepadanya selain yang berkaitan pada pelayanan manajemen atau jumlah pengeluaran yang telah disebutkan.

(b) Mudharib akan menyediakan jasa operasi dan pengeluaran seperti yang tertera pada lampiran, khususnya dalam perubahan kompensasi yang tertera pada lampiran sebagai pengeluaran proyek dan diberikan hak kepadanya selain jumlah yang berkaitan dengan pelayanan jasa operasi atau pengeluaran yang telah disebutkan.

3. Partisipasi masing-masing pihak (Bank Syariah Mandiri dan Mudharib) dalam pembagian pendapatan adalah :

- (a) Pendapatan yang dapat dibagi yang diridlohi Allah SWT, jika ada pertama kali akan dialokasikan secara kuwartalan, ketika pendapatan yang dapat dibagi positif sebagaimana tertera pada buku proyek. (alokasi untuk pembiayaan modal kerja 65% dan alokasi untuk pembiayaan modal asset 35%).
 - (b) Selanjutnya alokasi pembiayaan modal kerja dan modal asset akan dikredit pada akhir kwartal secara terpisah rekening mudharib dan rekening bank dalam proporsi seperti kontribusi yang dijanjikan-pada masing-masing pembiayaan modal kerja dan pembiayaan modal asset sebagaimana yang telah disepakati.
4. Partisipasi kerugian, jika ada, akan dipikul oleh mudharib dan Bank Syariah Mandiri dengan perhandingan jumlah yang sebanding dengan kontribusi untuk setiap pembiayaan modal kerja dan pembiayaan modal asset yang telah ditetapkan tersebut diatas yang berakibat pembagian pendapatan dari proyek akan menjadi tidak cukup.

Sebagai pengaman terhadap kewajiban mudharib untuk membayar dan untuk melaksanakan pembayaran pada saat tanggal pencairan mudharib akan menyimpan dana sebagai jaminan rekening deposito. Pendapatan dari jaminan deposito akan ditransfer dari rekening deposito kepada mudharib sebagai

pendapatan. Bank Syariah Mandiri akan mentransfer dari besarnya deposito, jumlah yang tersedia akan dibutuhkan untuk membayar kewajiban mudharib pada saat jatuh tempo.

Sebagai jaminan atas tanggung jawab dan performan dari seluruh tanggung jawab mudharib yang tertera, maka mudharib harus melengkapi dengan jaminan tambahan kepada bank Garansi dan bank tidak berkewajiban untuk melengkapi setiap dan sebagaimana yang tertera pada perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah, sampai dokumentasinya dilengkapi dan bahan-bahan yang memuaskan bank yang telah diserahkan sebagai akibat dari transaksi.

Sebagaimana tersirat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

2.2. Manfaat dan Risiko pembiayaan secara Musyarakah diantaranya adalah sebagai berikut :

- (a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan

dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;

- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
- (d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;
- (e) Prinsip bagi hasil mudharabah maupun musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagiti penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam al-musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

- (a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b) Lalai dari kesalahan yang disengaja;
- (c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Dari kedua bentuk pembiayaan tersebut diatas (perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah dan perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah) dalam klausulnya ditentukan bahwa perjanjian ini akan diatur dan tunduk pada hukum positif yang berlaku di negara RI yang tidak bertentangan dengan hukum Syariah.

C. Hambatan Yuridis yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Semarang dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

1. Hambatan Yuridis Penerapan Prinsip Bagi Hasil

Memperhatikan laju ekspansi di Bank Syariah dalam tahun-tahun terakhir ini telah menunjukkan kelangsungan dan kelayakan sistem operasi tanpa berdasarkan bunga. Hal ini tentu mengejutkan siapa saja yang percaya bahwa bank dan sistem keuangan tidak akan dapat beroperasi dalam suatu ekonomi modern tanpa bergantung pada mekanisme tingkat bunga. Pengalaman selama enam tahun Bank Syariah Mandiri Semarang beroperasi melalui empat skim produk pembiayaan yaitu Mudharabah, Musyarakah, Bank Syariah Mandiri Semarang dibidang penyaluran dana kepada masyarakat mengintensifkan dua bidang yaitu pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Hal ini ternyata menimbulkan presepsi dari masyarakat menganggap tidak ada bedanya antara margin keuntungan dalam Bank Syariah Mandiri dengan bunga pada perbankan konvensional. Akibatnya masyarakat masih

meragukan kemurnian Bank Syariah Mandiri sehingga mereka tetap menggunakan jasa perbankan konvensional dan enggan beralih pada Bank Syariah Mandiri. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan Bank Syariah Mandiri Semarang. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan Bank dan perbankan Syariah pada umumnya. Hambatan yang lain adalah:

a) Kurangnya perangkat hukum.

Selama ini dasar hukum operasionalnya Bank Umum Syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang berupa surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga masih diperlukan peraturan pendukung lainnya. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini menyebabkan perbankan Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri berusaha menyesuaikan produknya dengan hukum yang berbeda. Perangkat hukum yang kurang konduktif juga mengakibatkan konsekuensi lain dari operasional perbankan Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri. Ketika terjadi likuiditas, misalnya belum tersedia fasilitas likuiditas tanpa bunga dari Bank Indonesia.

Demikian pula untuk menjalankan produk-produk kerjasama antara bank Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri, selalu

didasarkan atas tingkat pengembalian yang tetap (*fixed*), adalah bertentangan dengan ciri utama operasional, bank bagi hasil seperti halnya Bank Syariah Mandiri. Kasus yang sama juga terjadi dalam standar akuntansi yang digunakan.

b) Masalah sumber daya manusia insani

Dikotomi dalam sistem pendidikan syariah dan pendidikan umum menyebabkan adanya dualisme intelektual diantara para ulama dengan sarjana-sarjana muslim, sementara produk-produk perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri harus diciptakan oleh kedua disiplin tersebut secara bersama-sama. Disamping itu masyarakat muslim Indonesia pada umumnya belum terpikir dengan praktek perbankan syariah. Oleh karena itu merekapun memandang perbankan syariah (dengan menggunakan persepsi konvensional. Selain itu ada pula sebagian masyarakat menganggap bahwa perbankan syariah sebagai lembaga sosial, bukan lembaga ekonomi atau bisnis.

Langkanya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan operasional Bank Syariah. Kendala sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan oleh karena system perbankan ini belum lama dikembangkan. Disamping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas,

sehingga tenaga terdidik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih terasa kurang.

c) Standar Fatwa

Dewan syariah Nasional berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa yang diperlukan sebagai referensi bagi kegiatan operasional dan transaksi. Transaksi serta piranti-piranti yang dipergunakan dalam sistem perbankan dan keuangan syariah yang diperlukan untuk menjamin agar undang-undang perbankan dan peraturan pelaksanaannya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini juga melakukan audit kesyariaan terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariat. Namun demikian dalam praktek ternyata keseragaman fatwa tentang beberapa produk perbankan syariah. Hal ini disebabkan setiap Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan berbeda dengan yang lain. Kondisi yang demikian ini yang dapat membingungkan umat dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

2. Usaha penyelesaian hambatan Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan terhadap Nasabah

Dalam rangka untuk mengatasi hambatan Yuridis tersebut diatas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah segera menindaklanjuti Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan membuat peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan operasional bank syariah. Untuk ini, bank Indonesia dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang No.23 tahun 1999 sangat diharapkan dapat mewujudkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan mendukung tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia.

Pembenahan aturan hukum yang diperlukan untuk pengembangan Bank Syariah, terutama aturan – aturan yang berhubungan dengan pengembangan operasional Bank Syariah.

2. Perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan pada tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi, guna memberikan bagi mata pelajaran atau kuliah ekonomi Islam khususnya bank Syariah.
3. Perlu adanya penegasan mengenai keseragaman fatwa tentang produk-produk perbankan syariah dari setiap institusi yang berkaitan dengan fatwa sehingga tidak ada lagi kemungkinan fatwa yang membingungkan umat.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena dengan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional, suatu bank termasuk perbankan syariah dapat melakukan usaha / kegiatan dengan

baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai nasabahnya.

5. Perlunya sosialisasi, melalui mass media baik elektronik maupun media massa serta sosialisasi langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat terutama umat islam bisa mengenal bank yang sesuai dengan keyakinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip penerapan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah Bank Syariah Mandiri yang di dasarkan pada kepercayaan terhadap nasabah dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka risiko akan ditanggung bersama antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Konsep Bank Syariah Mandiri berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha.

Bukan sebagai hubungan debitur dan kreditur, sehingga bank dari mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul risiko kerugian.
2. Penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri menimbulkan dampak antara lain dalam hal terjadi kerugian dari nasabah, maka asset yang dimiliki oleh nasabah dijadikan jaminan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu implementasi, konsep bank syariah. Sistem bagi

hasil ini telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri (cabang Semarang) dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Jika dibandingkan dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, pembiayaan ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaan yang substansial adalah dari segi konstruksi hukumnya dan kontra prestasi. Selain itu hal yang cukup signifikan adalah akad atau perjanjian pembiayaan klausul-klausul. mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (mudharib).

3. Hambatan Yuridis yang dihadapi Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan prinsip bagi hasil adalah belum adanya Perangkat Hukum yang mengatur secara terperinci dalam suatu peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Insani yang terbatas mengenai perbankan syariah, belum adanya keseragaman Standar Fatwa tentang beberapa produk perbankan syariah. Sehingga nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri, apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian dana masih mendasarkan pada peraturan bank konvensional dan perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabah.

Usaha penyelesaian untuk menghadapi hambatan yuridis, pemerintah segera menindaklanjuti Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan membuat

peraturan – peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan operasional bank syariah.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Bank Syariah Mandiri dengan sistem syariah yang menerapkan perjanjian pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil dan juga harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
2. Perlu adanya perangkat hukum yang mendukung keberadaan bank syariah khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasar prinsip bagi hasil, sehingga di dalam penerapannya tidak mendasarkan pada ketentuan bank konvensional.
3. Perlu diperhatikan pengembangan SDM yang memahami Bank Syariah secara keseluruhan dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan, sehingga dapat mengembangkan produk-produk dari Bank Syariah Mandiri yang mudah dipahami masyarakat.
4. Membuka jaringan kantor cabang Bank Syariah seluas – luasnya, agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan Bank Syariah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan Bank Syariah sebagai alternatif diantara sistem – sistem yang berlaku saat ini di masyarakat.

5. Meningkatkan jumlah modal dengan menjalin kerjasama dengan Bank Syariah lain baik di dalam dan di luar negeri, karena dengan modal yang ada sekarang akan sulit bagi Bank Syariah untuk berkembang dan mengadakan ekspansi usahanya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus, Bustanuddin, 1999, *Pengembangan ilmu-ilmu Sosial, Studi Perbandingan Antara Pandangan Ilmiah Dengan Ajaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Alma, Buchari, 1994, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Alvabeta, Bandung.
- An-Nahbani Tagyuddin, 1996 M/An Nidlam, *Al Iqtishadi Fil Islam* diterjemahkan oleh Magfur Wachid, Mohammad, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Risliah Gusti, Surabaya.
- Antonio, Muhammad Safi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
- , 1420 H/1999 M, *Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut*, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J.van, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- AS, Homby, 1989, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oyez Publishing, London Ltd.
- A. Rifa'I, Mien, 1997, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abu Saud, Mahmud, 1996, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Adi Bastian Salam, *Kedudukan Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jurnal Penelitian Hukum, Edisi X Januari, 2000, Bengkulu) hal. 18
- Afzalurrahman, Muhammad, 1995, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad As A Trader)*, Yayasan Swarna Bhuny, Jakarta.
- Aikin Zaenal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, ("Radja Grafindo, Jakarta, 1995) hal 4
- Al Anshari, Mahmoud, 1993, *Perbankan Islam*, terjemahan Minaret, Jakarta.

- Almath, Muhammad Faiz, 1998, *1100 Hadist Terpilih*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Al vabet, Jakarta.
- Ashshiddiqi, T.M.Hasbi, *Al Qu'an dan Terjemahannya*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainul, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Balai Pustaka, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, cetakan ke sembilan, Jakarta.
- Black, Donald, 1973, *The Bahavior of Law*, Academic Press, Inc, New York.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition), West Publishing Co, St, Paul Minnesosa, USA.
- Burgh, Gr.Vander, editor Wila Chandrawila S, 1999, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Cecep K Halim, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Seminar Nasional perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, 21 September 2000, hal 3
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Bagi Hasil*, (Intermedia : Jakarta, 1995), hal. 124
- Darus Badruzaman, Mariam, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Daud Ali, Muhammad, 1998, *Hukum Islam*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Dunne, JM. van Gr. van der Burght, terjemah Lely Niwa, 1987, *Hukum Perjanjian*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia.
- ELIPS, 1998, *Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif*, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang.
- , 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Rajawali Press.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prektek*, Buku kesatu, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hallaq B.Idael, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Pengantar Untuk Usul Figh Mazhab Suni, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Madju, Bandung.
- , 1992, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-21*, Alumni, Bandung.
- , 1980, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, FH-UNTAG, Semarang.
- Keraf, Gorys, 1997, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores.
- , 1982, *Eksposisi dan Diskripsi*, Nusa Indah, Flores.
- Khairandy, Ridwan, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta.
- Kusumaadmaja, Mochtar, 1977, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 1997), hal. 178
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Kalam Mulia, Jakarta.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut dengan Bank Indonesia, (Jakarta, 1999), hal 95-96
- Mahmoud al Anshari, *Perbankan Islam*, terjemahan Minaret 1993, hal. 96
- Manan, Abdul, 1997, *Islamic, Economic, Theory dan Practics*, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Nastangin, dkk, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT.Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin, *Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangannya Di Indonesia*, Tesis Undip, 2001, hal. 8
- Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Press, Yogyakarta.
- , 2000, *Sistem dan Prosedur operasional Bank Islam*, UII, P Yogyakarta.
- , 2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII, Press, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1-86
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta : 2001), hal. 9-160
- Muslehuddin, Muhammad, 1990, *Sistem Perbankan Islam*, judul asli : Banking and Islamic Law, Penejemah Aswin Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muthahari, Murtadha, 1996, *Islam dan Tantangan Jaman*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- , 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Mutwally, MM, 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Penterjemah, Sawit, M Husein, PT. Bangkit Daya Insani, Jakarta.

- Neni Sri Imaniyati, *Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia*, Tesis Undip, 1997, hal. 4
- Patria, Nezar dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci Negara dan Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang), Mandar Maju, Bandung.
- , 1988, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, FH UNDIP, Semarang.
- , 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Peter, A.AG, Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- Perwataatmadjua, Kernaen dan Muhammad Safi'I Antonio, 1994, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Putra, Edy Tje'Aman, 1985, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta
- Qardawi, Yusuf, 1417 H/1997 M, *Membumikan Syariat Islam*, Penerjemah Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Dunia Ilmu, Surabaya.
- , *Fawaid Al Bunuk: Hiya Ar-Riba Al-Haram*, Diterjemahkan oleh Daud Rasyid, *Bank Tanpa Bunga, Sebuah Analisis Hukum (Figh) tentang "BUNGA BANK" Berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Fakta, Disertai dengan Bantahan Ilmiah terhadap 'Fatwa' Mufti Mesir mengenai : Sertifikat Obligasi*, Usamah Press, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf, *Fawa'ai Al Bunuk: Hiya Ar-Riba Al-Haram*, diterjemahkan oleh Daud Rasyid, *Bank Tanpa Bunga, Sebuah Analisis Hukum (Figh) tentang "Bunga Bank" berdasarkan Al Qur'an, Sunnah*.
- Qurdhow, Yusuf, 2001, *Bank Tanpa Bunga*, penerjemah Daud Rasyid, Usamah Press, UNAS, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 1983, *Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili., IB Wyasa, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. (Jakarta, 1994), hal. 12
- Rusli, Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan Budi Utomo, *Jawaban Tuntas Masalah Bunga*, Kolom Fiqh Kontemporer Majalah Saksi Bunga, No. 10 Tahun III, 2001, hal 37
- Siamat, Dahlan, 1995, *Manajemen Bank Bagi Hasil*, Intermedia, Jakarta.
- Siddiqi, M. Nejatullah, penerjemah, Fakhriyah Mumtihan, 1997, *Kemitraan Usaha dan Baga Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- , 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang
- , 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- , 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, 1985), hal. 14-15
- Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

-----, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

-----, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Sudewo, Eri, 1999, *Ekonomi Bebas Bunga*, Pedoman Akuntansi Syariah, Panduan Praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil, Bandung.

Sumitro, Warkum, 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait* (BMUI dan Takaful) di Indonesia, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Suroso, R. 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini dalam Neni Sri Irnaniati, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah* (Seminar Nasional, UNISBA, Bandung, 2000), hal. 10

-----, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Pustaka Utama, Grafiti : Jakarta, 1999), hal. 76

Widjanarto, 1997, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.

Zuhdi, Masfuh, Masaid Fiqiyah, 1987, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Haji Mas Agung, Jakarta.

B. MAKALAH/JURNAL PENELITIAN/MAJALAH/TESIS/DISERTASI

Arifin, Zainul, 2000, *Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Konggres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei.

A. Perwataatmadja, Karnaen, *Konsep, Operasionalisasi, dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia*, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol.2, No.3 Desember 1999.

Baraba, Achmad, 1999, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol.2, No.3 Desember 1999.

Bud Utomo, Setiawan, 2001, *Jawaban Tuntas Masalah Bunga*, Kolom Figh Kontemporer, Maj alati Saksi Bunga, No.10 Tahun III.

- Muftah, Farid, 2000, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.
- Gunawan, Dhani, *Perbankan Syariah Indonesia Menuju Millenium Baru : Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan dan Prospek*, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol.2, No.3 Desember 1999.
- Hasan, Djuhaendah, 2000, *Kedudukan dan Fungsi Bank syariah Sebagai Lembaga Pembiayaan Madani*, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.
- Joyosumantoro, Soebardjo, 2000, Majalah Saksi No.20 Tahun II Tanggal 31-13 Juni.
- K. Halim, Cecep, 2000, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram.
- Karim, Adiwarmanto, 2000, *Peluang dan Kendala Pasar Keuangan Perbankan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.
- Kelib, Abdullah, 1998, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kotamadia Semarang*, Penelitian, Masalah Masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, Edisi III, Oktober.
- , 1997, *Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah FH-UNDIP, No.1, 1997.
- , 1997, *Pemerataan Ekonomi Perspektif Hukum Islam, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah FH UNDIP, No.3, 1997.
- , 1997, *Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam, Masalah Masalah Hukum*, Majalah FH UNDIP, No.4, 1997.
- , 1997, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah FH-UNDIP, No.6, 1997.
- Maskanul Hakim, Cecep, *Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah*, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol.2, No.3 Desember 1999.
- Muhaimin, 2001, *Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangannya Di Indonesia*, Tesis, UNDIP.

- Salam, Adi Bastian, 2000, *Kedudukan Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Edisi X Januari, Bangkulu.
- Setiawan, 1995, *Kontrak Standar Dalam Teori dan Praktek*, Varia Peradilan No.103.
- Sanusi, M.Arsyad, 1995, *Iktikad Baik, Keputusan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan, No.103.
- Setiadi, A, 2000, *Bank Islam Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Newsletter No.40/III/Maret, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Rahasia Bank Berbagai Masalah dan Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.8, Jakarta.
- Sri Imaniyati, Neni, 2000, *Kesiapan Hukum Ekonomi indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah*, Makalah Seminar Nasional, UNISBA, Bandung.
- Sri Imaniyati, Neni, 1997, *Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia*, Tesis, UNDIP.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Hukum Sebagai Mekanisme Pengintegrasi, Lembaran Hukum dan Masyarakat*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Nomor 6, UNDIP, Semarang.
- Suyono, 2000, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.
- Siregar, Mulya E, 2000, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 oktober.
- Tazkia, Institute, 1999, *Riba dan Permasalahannya*, Makalah.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992

Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia